

**2021**



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS**

**Laporan  
Kinerja  
Instansi  
Pemerintah  
Tahun 2021**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2022**

**Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311**

**Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030**

**Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id)**

**Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Kedudukan , tugas pokok dan fungsi.....	2
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	8
E. Landasan Hukum.....	18
F. Sistematika.....	18
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	20
B. Perencanaan Kinerja.....	21
C. Perjanjian Kinerja.....	32
D. Rencana Anggaran.....	32
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	37
B. Analisis Capaian Kinerja.....	40
C. Realisasi Anggaran.....	56
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi.....	59
 <b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja .....	60

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.2 Distribusi pegawai menurut tingkat Pendidikan .....	8
Tabel 1,3 Distribusi pegawai menurut jabatan.....	8
Tabel 1.4 Sarana prasarana .....	9
Tabel 1.5 Rekapitulasi SDM di fasyankes .....	9
Tabel 1.6 Status akreditasi puskesmas.....	10
Tabel 1.7 Jenis sumber biaya dan alokasi.....	11
Tabel 1.8 Luas wilayah.....	11
Tabel 1.9 Pemetaan permasalahan.....	13
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah .....	22
Tabel 2.2 Indikator kinerja Dinasa Kesehatan .....	22
Tabel 2.3 Indikator kinerja SPM .....	23
Tabel 2.4 Rencana kerja, sasaran,program .....	27
Tabel 2.5 Perjanjian kinerja .....	32
Tabel 2.6 Alokasi anggaran.....	32
Tabel 3.1 Capaian indicator kinerja utama .....	37
Tabel 3.2 Capaian kinerja urusan kesehatan target RKPD .....	38
Tabel 3.3 Capaian kinerja mengacu SPM.....	38
Tabel 3.4 Kategori capaian IKU.....	40
Tabel 3.5 Status Capaian .....	45
Tabel 3.7 Perbandingan capaian indikator utama.....	47
Tabel 3.8 Perbandingan Status capaian kinerja urusan kesehatan .....	48
Tabel 3.9 Perbandingan tiga tahun terakhir status capaian kinerja utama.....	49
Tabel 3.10 Perbandingan tiga tahun terakhir status capaian kinerja urusan kesehatan....	49
Tabel 3.11 Analisis dan solusi terhadap capaian kinerja .....	51
Tabel 3.12 Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran.....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Dinas Kesehatan.....	7

## DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 3.1 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2020.....	42
---	----

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kudus .

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Kudus, 14 Februari 2022

Plh KEPALA DINAS KESEHATAN  
SEKRETARIS,



dr. ANDINTA RIDEWI, MKes

Pembina Tingkat 1  
NIP.197310082005012009

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa negara. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dikembangkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun untuk:

1. Memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kinerjanya.

### C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, menyebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terdiri dari :

1. 1 (satu) Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
2. 3 (tiga) Bidang dan masing-masing bidang sebanyak 3 (tiga) Seksi.

Selain itu terdapat UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 UPTD dan 1 (satu) , namun sejak tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Kudus nomor 70 Tahun 2020 tentang Pembentukan , Kedudukan, Susunsn Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menjadi 19 UPTD Puskesmas dan 1 (satu) UPT Laboratorium Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
2. Penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
3. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
4. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
5. Pengendalian dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
6. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
7. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
8. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1). Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- 2). Subbag Umum dan Kepegawaian

Adapun fungsi dari bagian sekretariat adalah :

- 1). Perumusan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 2). Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 3). Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- 4). Pengelolaan organisasi dan tata laksana Dinas.
- 5). Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi gizi masyarakat dan kesehatan keluarga, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja.

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- 1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- 2). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- 3). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja

Adapun fungsi dari bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah :

- 1). Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- 2). Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- 3). Pengkoordinasian tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

- 4). Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan
  - 5). Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian penyakit meliputi pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, surveylan dan Imunisasi serta Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bidang Pengendalian Penyakit Terdiri dari :

- 1). Seksi Surveylan dan Imunisasi
- 2). Seksi Pengendalian Penyakit Menular
- 3). Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Adapun fungsi bidang Pengendalian Penyakit adalah :

- 1). Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - 2). Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - 3). Pengkoordinasian tugas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - 4). Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan;
  - 5). Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi perijinan, sertifikasi, farmasi, perbekalan kesehatan, manajemen informasi, dan pengembangan kesehatan serta Pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

- 1). Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
- 2). Seksi Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan
- 3). Seksi SDK, Perijinan, Sertifikasi dan Manajemen Informatika

Adapun Fungsi bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan adalah :

- 1). Perumusan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
  - 2). Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
  - 3). Pengkoordinasian tugas di bidang Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan;
  - 4). Pembinaan, fasilitasi dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
  - 5). Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas
- UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan terdiri dari 19 UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
- 1). Penyusunan program rencana kerja dan kegiatan untuk rencana anggaran satuan kerja UPTD Puskesmas;
  - 2). Pelayanan pengobatan, rawat inap, rawat jalan dan laboratorium;
  - 3). Pelayanan kesehatan ibu, anak dan usia lanjut serta KB;
  - 4). Pelayanan dan peningkatan gizi masyarakat;
  - 5). Pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta imunisasi;
  - 6). Pelayanan kesehatan khusus;
  - 7). Pelaksanaan pelayanan rujukan;
  - 8). Perawatan kesehatan masyarakat;
  - 9). Penyuluhan kesehatan masyarakat, pembinaan peran serta masyarakat dan kesehatan kerja;
  - 10). Penyehatan lingkungan;
  - 11). Pembinaan dan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
  - 12). Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan;
  - 13). Penyiapan bahan dan sarana pelayanan kesehatan;
  - 14). Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta barang daerah;
  - 15). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

UPT Labkesda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, UPT laboratorium kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan untuk rencana anggaran satuan kerja UPT Laboratorium Kesehatan;
- 2). Pengambilan dan pemeriksaan spesimen penyakit secara mikroskopis, mikrobiologi dan klinik;
- 3). Pengambilan dan pemeriksaan spesimen air, tanah, udara dan limbah secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
- 4). Pelaksanaan pelayanan rujukan laboratorium;
- 5). Penyiapan bahan dan sarana pelayanan laboratorium;
- 6). Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta barang daerah;
- 7). Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT laboratorium kesehatan.

7. Jabatan Fungsional

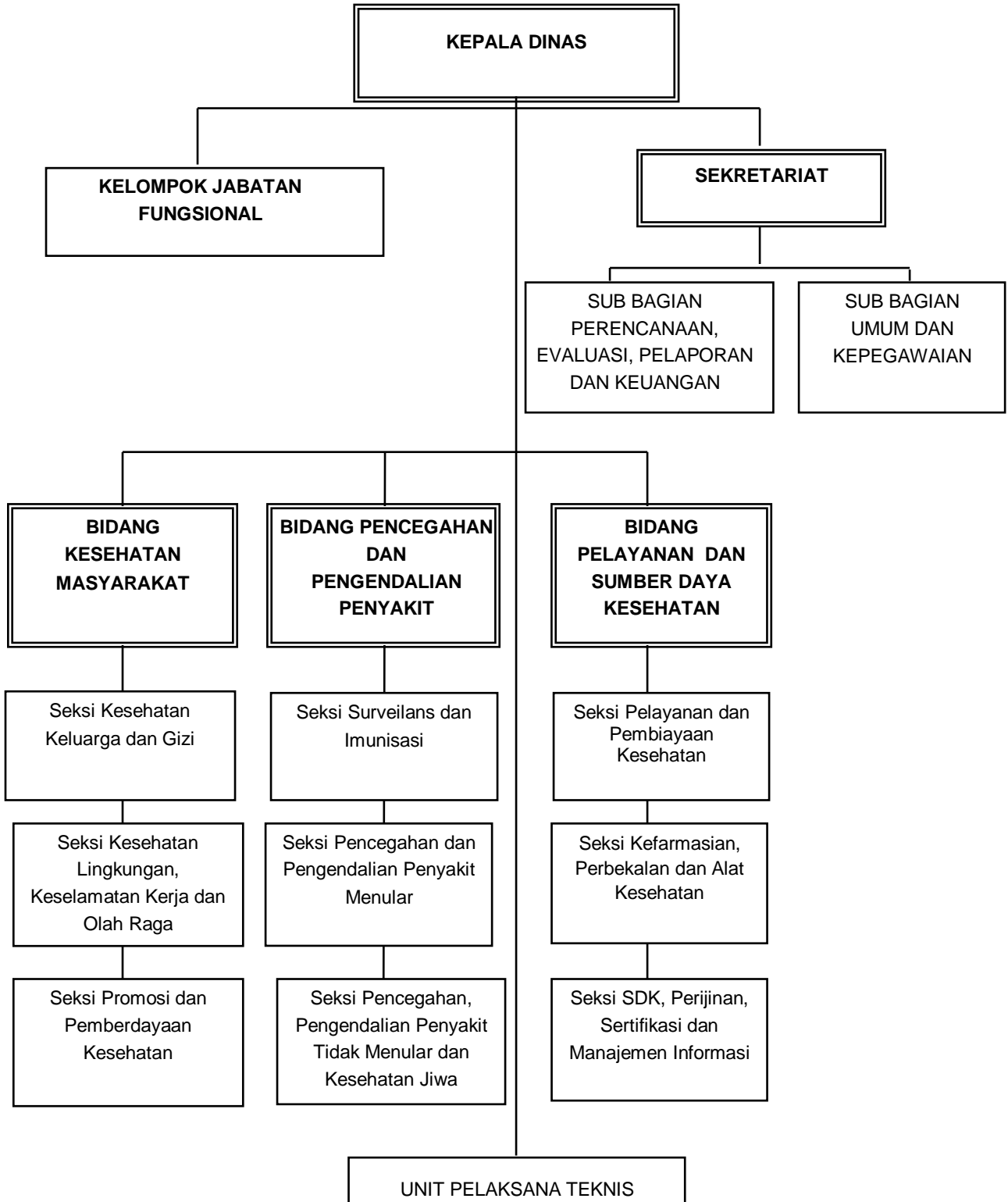
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas pokok Dinas, sedangkan fungsinya sebagai berikut:

- 1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- 2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- 3). Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bagan organisasi Dinas Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**



**Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas kesehatan Kabupaten Kudus**

## D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Aspek Strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Aspek tersebut antara lain :

### 1. Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana

#### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebanyak 774 orang terbagi di Dinas Kesehatan dan UPT. Dinas Kesehatan sebanyak 71 pegawai terdiri dari 59 (lima puluh sembilan ) orang PNS, 12 (dua belas) orang Pegawai Honor Daerah (PHD). Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mempunyai 19 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD ) Puskesmas sebanyak 685 orang dan 1 UPT Labkesda sebanyak 18 orang

Tabel 1.2 . Distribusi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021

No	Instansi	Tingkat Pendidikan					
		SD/ sdrjt	SMP/ sdrjt	SMA/ sdrjt	D1/D2/D3	D4/S1	S2
1.	DKK	1	1	17	16	27	9
2.	Puskesmas	1	7	72	344	242	9
3.	Laboratorium Kesehatan	-	-	1	10	4	3
Jumlah		2	8	90	380	332	21

Berdasarkan tabel diatas dari 774 pegawai sebagian besar berpendidikan Perguruan Tinggi mulai level Diploma 3 sampai pasca sarjana yaitu 91,98% , ini menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia sudah memadai.

Tabel 1.3 . Distribusi Pegawai menurut jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Struktural	Apoteker	Asisten Apoteker	Bidan	Dokter Gigi	Dokter	Entomolog kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pranata Labkes	Nutrisionis	Penyuluh Kesmas	Perawat	Perawat Gigi	Radiografer	Sanitarian	Staf	Jumlah
1	DKK	15	2	4	1	0	1	1	5	0	4	4	2	0	0	2	30	71

No	Satuan Kerja	Struktural	Apoteker	Asisten Apoteker	Bidan	Dokter Gigi	Dokter	Entomolog kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pranata Labkes	Nutrisionis	Penyuluh Kesmas	Perawat	Perawat Gigi	Radiografer	Sanitarian	Staf	Jumlah
2	LAB.KES	2	0	0	2	0	1	0	0	6	0	0	2	0	3	1	1	18
3	Puskesmas Bae	2	0	1	12	1	2	0	1	0	1	1	5	1	0	0	1	28
4	Puskemas Dawe	2	0	1	25	1	4	1	1	1	0	1	9	1	0	0	2	49
5	Puskesmas Dersalam	2	0	1	11	0	3	0	1	1	1	0	6	0	0	0	1	27
6	Puskesmas Gondosari	2	1	1	13	1	2	0	1	0	1	0	5	1	0	1	1	30
7	Puskesmas Gribig	2	0	1	16	1	4	1	1	2	1	0	10	1	0	1	2	44
8	Puskesmas Jati	2	0	1	14	1	2	1	0	0	1	0	7	1	0	1	3	34
9	Puskesmas Jekulo	2	1	0	19	1	4	1	0	2	1	0	10	1	1	1	2	45
10	Puskesmas Jepang	2	0	2	17	0	3	0	1	1	1	0	8	2	0	1	2	39
11	Puskesmas Kaliwungu	2	1	1	19	0	4	0	1	1	0	0	6	1	0	1	1	39
12	Puskesmas Mejobo	2	1	1	19	1	3	1	1	1	1	1	10	1	0	0	1	44
13	Puskesmas Ngembal Kulon	1	0	1	11	1	2	1	1	1	1	0	2	1	0	1	3	26
14	Puskesmas Ngeplak	2	0	1	11	1	2	1	0	0	1	1	3	1	0	0	1	25
15	Puskesmas Purwosari	2	0	1	14	1	2	1	1	0	1	1	5	1	0	1	2	33
16	Puskesmas Rejosari	2	1	2	19	1	4	1	1	2	0	1	9	1	1	1	3	50
17	Puskesmas Rendeng	2	0	1	12	1	2	0	1	0	1	1	7	1	0	0	0	28
18	Puskesmas Sidorekso	2	0	1	10	1	4	0	0	0	1	1	5	1	0	1	1	27
19	Puskesmas Tanjungrejo	1	0	1	18	1	3	0	1	0	1	0	6	1	0	1	3	37
20	Puskesmas Undaan	2	0	1	25	1	3	0	0	1	1	1	10	0	0	0	3	48
21	Puskesmas Wergu Wetan	2	0	1	14	1	2	0	0	1	1	0	6	1	0	0	3	32
Jumlah		53	8	23	302	16	56	10	18	20	20	13	133	18	5	14	66	774

Dilihat dari tabel tersebut distribusi pegawai menurut jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021 sejumlah 708 yaitu 91,47% merupakan rumpun jabatan fungsional tertentu sesuai standard jenis profesi yang menunjang pelayanan kesehatan untuk pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data inventaris bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus terdapat perlengkapan, sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jenis Sarana Prasarana Dinas Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun 2021

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH
1)	Gedung DKK	1 buah
2)	Gedung Puskesmas	19 buah
3)	Gedung Laboratorium	1 buah
4)	Mobil DKK	11 buah
5)	Mobil Puskesmas Keliling	41 buah
6)	Mobil Operasional Laboratorium	2 buah
7)	Sepeda motor DKK	50 buah
8)	Sepeda motor Puskesmas	83 buah
9)	Sepeda motor Laboratorium	3 buah

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 1.5 Rekapitulasi SDM di Fasyankes di Kabupaten Kudus Tahun 2021

No	Tipe Fasyankes	Jumlah Fasyankes
1	Dinas Kesehatan	1
2	Puskesmas	19
3	Rumah Sakit	10
4	BBPK, Bapelkes/Bapelkesnas	-
5	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	-
6	Balai Pengobatan / Kesehatan Masyarakat	-
7	Apotik	102
8	Toko Obat Tradisional	-
9	Rumah Bersalin	-
10	Instalasi / Gudang Farmasi	1
11	Praktek Dokter / Dokter Gigi / Bidan Mandiri	171
12	Optik	8
13	Klinik Pengobatan Tradisional (Batra)	-
14	Klinik	39
15	Poliklinik / Praktek Bersama	-
16	Laboratorium Kesehatan	8
17	Fasyankes Lainnya	3
Jumlah		362

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kudus sudah cukup banyak dan merata di semua kecamatan. Sampai dengan akhir tahun 2021 semua Puskesmas sudah terakreditasi.

Tabel 1.6 Status Akreditasi Puskesmas se- Kabupaten Kudus Tahun 2021

No	Nama Puskesmas	Jumlah Desa/ Kel	Karakteristik Wilayah Kerja	Status Akreditasi
----	----------------	------------------	-----------------------------	-------------------



1	Kaliwungu	9	Perkotaan	Madya
2	Sidorekso	6	Perkotaan	Utama
3	Wergu Wetan	8	Perkotaan	Madya
4	Purwosari	10	Perkotaan	Madya
5	Rendeng	7	Perkotaan	Dasar
6	Jati	8	Perkotaan	Madya
7	Ngembal Kulon	6	Perkotaan	Madya
8	Undaan	10	Perkotaan	Madya
9	Ngemplak	6	Perkotaan	Madya
10	Mejobo	6	Perkotaan	Madya
11	Jepang	5	Perkotaan	Madya
12	Jekulo	6	Perkotaan	Utama
13	Tanjungrejo	6	Perkotaan	Madya
14	Bae	5	Perkotaan	Madya
15	Dersalam	5	Perkotaan	Dasar
16	Gribig	6	Perkotaan	Utama
17	Gondosari	5	Perkotaan	Madya
18	Dawe	9	Perkotaan	Madya
19	Rejosari	9	Perkotaan	Utama

### 3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Tabel 1.7. Jenis Sumber Biaya dan Alokasi Pembiayaan Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS SUMBER BIAYA	JUMLAH ALOKASI
1.	APBD	
	a. Gaji	68.411.996.000
	b. DTU - DAU	18.696.145.000
2.	DBHCHT	89.925.443.240
3.	Pajak Rokok	24.011.032.535
4.	BLUD	30.113.350.000
5.	DAK	
	a. DAK Fisik	7.894.063.950
	b. DAK Non Fisik	14.901.441.000
	c. DAK Non Fisik BPOM	519.689.000
		289.608.818.757

### 4. Aspek Wilayah

Aspek Wilayah dapat dianalisis strategisnya untuk menentukan sasaran Kesehatan, jarak atau jangkauan masyarakat ke Pusat Kesehatan Masyarakat.

Tabel 1.8. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Kepala Keluarga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH		JML PDDK	JUMLAH RUMAH	RATA-RATA	KEPADATAN PENDUDUK
			DESA	KEL				

		(km <sup>2</sup> )			(JIWA)	TANGGA	JIWA/RT	/km <sup>2</sup>
1	KALIWUNGU	3.271,3	15	0	102693	22.923	4,08	28,57
2	KOTA	1.047,3	16	9	92575	24.207	4,05	93,53
3	JATI	2.629,8	14	0	107867	26.383	3,08	40,40
4	UNDAAN	7.177,0	16	0	77035	20.269	312,00	1165,00
5	MEJOBLO	3.676,6	11	0	77732	18.205	4,11	20,33
6	JEKULO	8.291,7	12	0	108719	26.171	4,05	12,78
7	BAE	2.332,3	10	0	72740	17.678	4,04	30,62
8	GEBOG	5.506,0	11	0	104017	24.952	4,08	18,49
9	DAWE	8.583,7	18	0	106934	26.541	3,99	12,32
Jumlah Kabupaten		42.515,6	123	9	866548	207329	4,01	19,55

Sumber : dukcapil semester 1

Apabila dilihat dari penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi jumlah penduduknya adalah kecamatan jekulo sebesar 108,718 jiwa (12,78 %) dan yang terkecil adalah Kecamatan Bae sebesar 72740 jiwa (8,59 %) dari jumlah penduduk.

## 5. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan antara lain:

- a. Adanya agenda global Sustainable Development Goals bidang kesehatan
- b. Adanya beban ganda penyakit yaitu seiring meningkatnya penyakit menular disertai juga dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular serta pandemic covid 19
- c. Adanya transisi epidemiologi dimana kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat dan akan terus meningkat seiring dengan pola hidup yang tidak sehat (diet tidak sehat dan seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, minum alkohol beserta stress)
- d. Adanya beban ganda permasalahan gizi yaitu bukan hanya masalah gizi kurang dan gizi buruk saja tetapi juga masalah gizi lebih, kegemukan atau obesitas.

Sedangkan Peluang merupakan faktor pendorong yang berasal dari eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus didalam melaksanakan tugas dan fungsi. Beberapa peluang yang teridentifikasi saat ini dan masih ada dimasa yang akan datang antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus yang mendukung program kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan, hal ini dibuktikan melalui dukungan kebijakan pembangunan akses, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penganggaran program kesehatan dan dukungan dalam mendorong partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

- b. Adanya dukungan dari lintas sektoral, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan. Seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kudus pada umumnya sangat mendukung Program Pembangunan Kesehatan. Kesadaran akan kesehatan dan partisipasi aktif dalam program kesehatan telah terwujud pada sebagian besar masyarakat.
- c. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya menerapkan pola hidup sehat.
- d. Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kudus yaitu Puskesmas, Rumah Sakit baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, Klinik, Dokter Praktek Mandiri dan Praktek Mandiri Bidan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Swasta sangat berkembang pesat di Kabupaten Kudus. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Selain itu pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dikembangkan berbagai macam inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga pelaksanaan akreditasi baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer.

- e. Adanya dukungan dan bantuan pembiayaan Pemerintah Pusat dalam upaya pengembangan program kesehatan

Dalam pelaksanaan program dan pengembangan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mendapatkan banyak dukungan dan bantuan pembiayaan antara lain dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus, BOK Tambahan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Pajak Rokok

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan. Identifikasi masalah dan akar masalah di Dinas Kesehatan dimulai dari masalah pokok belum optimalnya capaian kinerja program kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit. Pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		
1	Angka Kematian Ibu (AKI) dan	1. Kepedulian dan dukungan	Pengetahuan dan pemahaman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Angka Kematian Bayi (AKB) masih fluktuatif	diri sendiri serta keluarga masih kurang	ibu dan keluarga tentang risiko tinggi kehamilan, persalinan dan nifas masih kurang
		2. Penyakit penyerta yang dipengaruhi kondisi pandemic Covid 19 menjadi penyebab kematian ibu terbanyak	Kurangnya deteksi dini terhadap riwayat penyakit penyerta serta kurangnya pemahaman terhadap risiko penyakit penyerta terhadap kondisi kehamilan, persalinan, nifs serta bayi
		3. BBLR menjadi penyebab kematian bayi	Status kesehatan ibu hamil yang kurang
2	Kasus stunting masih terjadi	Gangguan gizi pada masa remaja dan kehamilan (usia reproduksi)	Pengetahuan ibu tentang gizi kurang Prioritas pengeluaran dalam keluarga
3	Perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang	Capaian 3 indikator PHBS Rumah Tangga masih rendah (makan buah dan sayur, aktifitas fisik dan merokok)	Kurangnya pemahaman, kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (gerakan masyarakat hidup sehat)
4	STBM belum optimal	Implementasi 5 pilar belum optimal	Pemahaman masyarakat akan kesehatan lingkungan masih kurang
B.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
1	Adanya transisi epidemiologi dengan meningkatnya penyakit tidak menular	1. Meningkatnya prevalensi hipertensi 2. Meningkatnya prevalensi penyakit DM 3. Masih adanya kasus ODGJ	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan kegiatan posbindu di setiap desa dan institusi (screening kesehatan pada usia produktif 15-59 th dan usia lansia $\geq 60$ th): a. pengukuran TB, BB, lingkar perut b. pengukuran TD c. pemeriksaan GDS d. pemeriksaan kolesterol darah total e. pemeriksaan tingkat pendengaran f. pemeriksaan tingkat penglihatan g. pemeriksaan IVA bagi wanita usia 30-59 th 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya CERDIK (cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres) 3. Adanya budaya malu kalau ada keluarga yang terkena ODGJ, keterbatasan biaya, sistem rujukan BPJS
2	Belum tuntasnya pengendalian	1. Penemuan kasus baru	1. Penyimpangan perilaku/

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	penyakit menular	HIV/AIDS yang cenderung meningkat setiap tahun 2. TB MDR yang meningkat 3. Penjarangan kasus TB baru menurun akibat pandemic covid 19	moral 2. kepatuhan minum obat yg masih kurang 3. Angka penemuan TB yang masih perlu ditingkatkan 4. TB masih dianggap stigma buruk seperti halnya HIV/AIDS 5. Masih banyak yang malu utk memeriksakan diri dan berobat rutin
C.	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		
1	Cakupan kepesertaan JKN (UHC)	Kemandirian masyarakat dalam kepesertaan JKN masih kurang	Adanya pembiayaan kesehatan dengan persyaratan yang sangat mudah

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk penanganan, yaitu:

1. Peningkatan status kesehatan masyarakat dalam tahap kehidupan, mulai dari bayi hingga lansia (Continuum of Care)

Prioritas peningkatan status kesehatan adalah akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam siklus kehidupan . Jumlah kematian ibu di tahun 2019 ada 11 kasus dengan sebaran 4 kasus kematian ibu bersalin karena perdarahan (36,3 %), 5 kematian ibu hamil karena hipertensi dalam kehamilan (45,45 %) dan 2 kematian karena penyakit penyerta (18,18 %). Angka Kematian Ibu 72,90 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini sudah diatas target nasional yaitu 105 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian Ibu (AKI) mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yaitu 15 kasus , 6 kasus (40 %) terjadi pada masa kehamilan yang disebabkan oleh eklamsi 1 kasus, Preeklamsia Berat 1 kasus, Penyakit Jantung Bawaan 1 kasus , terkonfirmasi covid 2 kasus, serta B20 1 kasus, sedangkan 11 kasus ( 60%) terjadi pada masa nifas yang disebabkan oleh perdarahan 1 kasus, SLE 1 kasus, Penyakit Jantung Bawaan 1 kasus dan ternanyak yaitu 6 kasus karena terkonfirmasi covid 19. Bila dilihat dari total keseluruhan kasus kematian 53,3% yaitu 8 kasus disebabkan karena terpapar covid – 19. Kondisi tahun 2021 terjadi lonjakan kasus menjadi 21 kasus, 17 kasus (80,95%) terkonfirmasi covid – 19 , 4 kasus (19,04%) dikarenakan penyulit kehamilan persalinan yaitu, Pre Eklamsia, Penyakit jantung bawaan dan perdarahan.

Beberapa faktor resiko yang dihadapi selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta kondisi pandemic covid 19 tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri berkontribusi terhadap peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI). Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan , termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Penyebab kematian ibu antara lain karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 "terlalu" yaitu terlalu tua pada saat melahirkan ( $> 35$  tahun), terlalu muda ( $< 20$  tahun), terlalu banyak anak ( $>4$  anak) dan terlalu rapat jarak kelahiran/paritas ( $< 2$  tahun). Kondisi ini diperburuk oleh adanya pandemic covid 19 yang bersifat global

## 2. Pencegahan penyakit menular maupun tidak menular

Pada tahun 2020 persentase orang yang terduga TBC dan mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari jumlah sasaran 10430 orang yang mendapatkan pelayanan hanya 4325 yaitu 41,46 %, keadaan ini merupakan dampak pandemic covid 19 yang membatasi ruang gerak petugas dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sesuai standard.

Kasus HIV, jumlah kasus di tahun 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2018 kasus yang ditemukan sebanyak 46 kasus, sedangkan tahun 2019 sebanyak 152 kasus dengan rincian 109 dalam wilayah dan 43 luar wilayah. Peningkatan jumlah kasus ini perlu dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Deteksi dini telah secara luas dilakukan di fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit terhadap pasien dengan faktor risiko tinggi penularan HIV. Namun stigma buruk masyarakat terhadap kasus HIV merupakan salah satu faktor penghambat seseorang dengan risiko tinggi tertular HIV untuk memeriksakan dirinya. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi baru dalam melaksanakan deteksi dini HIV/AIDS yaitu dengan mendekati pada kelompok berisiko.

Pada tahun 2020 persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard 19668 orang sedangkan jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten kudos sebanyak 22000 orang yaitu 89,4%

Kasus DB di tahun 2018 mengalami penurunan drastis. Di tahun 2017 jumlah kasus DBD sebesar 110 dan total kasus di tahun 2018 sebanyak 61 kasus , meningkat pada tahun 2019 karena dipengaruhi oleh faktor cuaca yang ekstrim menjadi 182 kasus, dan pada tahun 2020 menurun secara tajam yaitu 40 kasus.

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti angka penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes militus, cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya merupakan 63 % penyebab kematian di seluruh dunia dengan membunuh 36 juta jiwa per tahun( WHO, 2010). Di Indonesia sendiri, penyakit tidak menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM semakin meningkat. Hal tersebut menjadi beban ganda (double burden) dalam pelayanan kesehatan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan.

Beberapa faktor resiko PTM antara lain ialah : merokok dan keterpaparan terhadap asap rokok, minum-minuman beralkohol, diet/pola makan, gaya hidup yang tidak sehat , kegemukan, obat-obatan, dan riwayat keluarga (keturunan). Prinsip upaya pencegahan tetap lebih baik dari pengobatan. Upaya pencegahan penyakit tidak menular lebih ditujukan kepada factor resiko yang telah diidentifikasi.

Presentase kasus Penyakit Tidak Menular terbanyak adalah Diabetes Millitus 119 %, baik IDDM (Insulin dependent Diabetes Millitus) ataupun NIDDM (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus), Hipertensi 27,07 % baik hipertensi esensial maupun hipertensi lain, Berdasarkan data penyakit tersebut menjadi prioritas utama dalam pengendalian PTM. Jika Hipertensi dan Diabetes Millitus tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan PTM Lanjutan seperti Jantung, Stroke, Gagal Ginjal dan sebagainya. Pengendalian PTM dapat dilakukan dengan intervensi yang tepat pada setiap sasaran/ kelompok populasi tertentu sehingga peningkatan kasus baru PTM dapat ditekan.

3. Percepatan Penurunan Stunting
4. Perlunya Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta perluasan cakupan jaminan kesehatan
5. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia

Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih sangat kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga kesehatan yang seharusnya bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Dengan tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang meningkat, bila hal ini kurang diantisipasi oleh tenaga kesehatan maka akan berakibat buruk dari berbagai aspek kehidupan khususnya untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pendidikan formal dan non formal dirasakan sangat kurang, sehingga diperlukan untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

Hal ini selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat diidentifikasi permasalahan yang mengacu pada permasalahan yang terdapat didalam RENSTRA tahun 2018-2023 untuk urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, isu strategis yaitu :

- a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
  - 1) Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
  - 2) Masih ditemukan balita gizi kurang dan stunting
- b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - 1) Adanya transisi epidemiologi dengan meningkatnya penyakit tidak menular
  - 2) Belum tuntasnya pengendalian penyakit menular
  - 3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

## **E. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023.

## **G. SISTEMATIKA**

Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selama tahun 2020. Dalam laporan ini, pencapaian sasaran, yaitu dengan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan secara singkat tentang organisasi meliputi latar belakang, dasar hukum, uraian singkat tugas dan fungsi, analisa isu strategis serta permasalahan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja, dan sistematika penyusunan LKjIP.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan muatan/substansi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta kaitannya dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**



Pada bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam lima tahun, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhiungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah kabupaten kudus yang tertuang dalam visi Bupati Kudus , Tahun 2018– 2023 yaitu kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera . Untuk mewujudkan visi tersebut melalui 4 pilar pembangunan yaitu pilar ke satu yaitu mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dalam rangka mencapai tujuan maka ada 3 (tiga) sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu :

- 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS);
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator sasaran yaitu persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi; dan
- 3) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran yaitu nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan

Secara singkat dapat digambarkan tujuan ,sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,46	76,48	76,49	76,51	76,52	76,54	76,54
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	65,97	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78

		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	8	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9	
	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,222	0,30	0,50	0,60	0,70	0,80	0,80	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	0	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	72,02	76,64	82	85	87	91	91	

## B. PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhiungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah kabupaten kudus yang tertuang dalam visi Bupati Kudus , Tahun 2018– 2023 yaitu kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera . Untuk mewujudkan visi tersebut melalui 4 pilar pembangunan yaitu pilar ke satu yaitu mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia yang dijabarkan dalam perencanaan kinerja Dinas Kesehatan.

Perencanaan kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat kudus. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2021 telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Secara singkat dapat digambarkan tujuan ,sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,51
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	59,27
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7,1
		Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,6
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	85

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdapat urusan Kesehatan yang harus diselenggarakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tujuan dan Sasaran RPJMD) Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.	Angka Kematian Ibu	65,97	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78
2.	Angka Kematian Bayi	8	7,8	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	19,00%	18,94%	18,87%	18,79%	18,60%	18,60%
4.	Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Cakupan Desa/kel. Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
	dan IDL							
7.	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,0%	90,0%	91,3%	91,3%	92,3%	92,7%	92,7%
8.	Cakupan pelayanan BLUD	100%	100%	-	-	-	-	-
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,5	82	83	83,5	85	85

Selain mengacu pada RPJMD Indikator kinerja Dinas Kesehatan juga mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Target Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat yang bersifat peningkatan/promotif dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Target Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	pencegahan/preventif						

Sasaran strategis meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diukur dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI diukur dengan membagi jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup kemudian hasilnya dibagi dengan 100.000 Kelahiran Hidup. Kematian ibu yang dimaksud merupakan kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Selain faktor penyebab kematian, AKI mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara, merefleksikan status kesehatan ibu selama hamil dan masa nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu adalah faktor medik, faktor non medik, dan faktor pelayanan kesehatan. Faktor medik penyebab kematian ibu bisa berasal dari faktor obstetrik yaitu kematian ibu yang diakibatkan langsung oleh kehamilan dan persalinannya seperti perdarahan, eklampsia dan infeksi, dan penyebab non obstetrik yaitu kematian ibu yang disebabkan oleh suatu penyakit, bukan komplikasi obstetri yang berkembang dan bertambah berat akibat kehamilan atau persalinan seperti kekurangan gizi, anemia dan penyakit penyerta lainnya. Faktor non medik merupakan faktor yang berkaitan dengan ibu dan menghambat upaya penurunan kesakitan dan kematian maternal, meliputi terbatasnya pengetahuan ibu tentang bahaya kehamilan resiko tinggi, ketidakberdayaan sebagian besar ibu hamil di pedesaan dalam pengambilan keputusan untuk dirujuk, ketidakmampuan sebagian ibu hamil untuk membayar biaya transport dan perawatan di rumah sakit. Faktor pelayanan kesehatan yang belum mendukung upaya penurunan kesakitan dan kematian ibu antara lain berkaitan dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), yang meliputi belum mantapnya jangkauan pelayanan KIA dan penanganan kelompok berisiko, rendahnya cakupan Ante Natal Care dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal itu semua berkaitan dengan terlambat mengambil keputusan merujuk, mencapai rumah sakit rujukan, mendapatkan pertolongan di rumah sakit rujukan

Selain Angka Kematian Ibu diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka kematian bayi umur 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum.

AKI dan AKB merupakan salah satu indikator strategis pembangunan kesehatan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang juga merupakan indikator strategis nasional dalam RPJMN 2018-2023 serta indikator global dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Upaya perbaikan status gizi masyarakat akan memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional terutama dalam hal penurunan prevalensi gizi kurang pada balita dan anak sekolah dasar serta

Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Indikator persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang memberikan gambaran tentang keadaan gizi balita. Balita gizi kurang merupakan balita yang memiliki berat badan kurang  $-2$  SD menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U). Kondisi ini diharapkan untuk segera dapat diatasi dalam rangka mewujudkan pondasi sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator persentase bumil KEK menggambarkan risiko yang akan dialami ibu hamil dan bayinya dalam masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Status gizi pada balita dipengaruhi oleh dua factor yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung yang mempengaruhi status gizi balita ialah penyakit infeksi dan asupan makan balita, sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi balita diantaranya ialah pendidikan, pengetahuan, ketrampilan keluarga dan ketahanan pangan yang berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah yang cukup, baik jumlah maupun gizinya serta pemanfaatan pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan, dengan penyebab dasar struktur atau kondisi ekonomi.

Permasalahan kesehatan lainnya kedepan adalah beban biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang semakin besar. Permasalahan ini akan terus meningkat karena semakin melebarnya kesenjangan antara peningkatan biaya pelayanan kesehatan dengan peningkatan penghasilan penduduk. Oleh karena penyakit-penyakit menahun (kronis) akan semakin dominan dan memerlukan masa perawatan panjang dengan biaya lebih tinggi, maka beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat akan semakin meningkat.

Standar pelayanan kesehatan merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu puskesmas, klinik pratama, dokter praktek mandiri dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yaitu rumah sakit dan laboratorium Kesehatan. Dalam menentukan standar pelayanan kesehatan, akreditasi merupakan mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya tersebut. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada memiliki sistem standar akreditasi yang berbeda-beda dalam menentukan standar pelayanan dan hal ini merupakan indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

Sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat diukur dari Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila  $IKS > 0,800$ ; 2) Keluarga Pra Sehat, bila  $IKS = 0,500 - 0,800$ ; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila  $IKS < 0,500$  adapun 12 indikator keluarga sehat terdiri dari : keluarga yang mengikuti keluarga berencana, persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, pertumbuhan balita dipantau, penderita TB paru berobat sesuai standard, penderita hipertensi berobat teratur, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai sarana air bersih dan keluarga menggunakan jamban sehat.

Adapaun rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi umum dengan kegiatan:
  - a. Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
  - b. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
  - c. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
2. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
  - a. Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi
  - b. Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
  - c. Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan kegiatan:
  - c. Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana
  - d. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dengan kegiatan:
  - a. Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
  - b. Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan
  - c. Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi
  - d. Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan
  - e. Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
  - f. Pelayanan Kesehatan BLUD



Tabel 2.4 Rencana Kerja Sasaran , Program dan Indikator Tahun 2021

Sasaran/ Indikator Sasaran	Bidang / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Input)	Target 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)		76,51	76,54
	Angka Kematian Ibu (AKI)		59,27	52,78
	Angka Kematian Bayi (AKB)		7,3	6,9
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		85	91
	1 Program Pelayanan Administrasi Umum			
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	85
	a Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja			
	1) Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja		19 dok	91 dok
	b Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan			
	1) Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan		7 dok	35 dok
	c Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur			
	1) Jumlah sarana prasarana aparatur kantor yang terpelihara		139 unit	139 unit
	2) Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar		6 dok	30 dok
	3) Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya		150 orang	763 orang
Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,6	0,8
	2 Program Pelayanan Kesehatan BLUD			

Sasaran/ Indikator Sasaran	Bidang / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Input)	Target 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
		1) Cakupan pelayanan BLUD	0	0
	a	Pelayanan Kesehatan BLUD		
		1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas	0	0
	3	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		
		1) Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%
	a	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi		
		1) Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar	17.050 bumil	85251 ibu hamil
		2) Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	16.275 ibu bersalin	81376 ibu bersalin
		3) Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	15.500 bayi	77503 bayi
		4) Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	77.061 balita	385141 balita
		5) Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	900 ibu hamil	4400 ibu hamil
		6) Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan	540 balita	2705 balita
		7) Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	4.950 bayi	24750 bayi
		8) Jumlah ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	16.910 ibu hamil	84550 ibu hamil
		9) Jumlah remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	22.250 siswa	111205
	b	Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga		
		1) Jumlah desa/kelurahan STBM	38 desa/kel	76 desa
		2) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dasar	19 Pusk	19 pusk
		3) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	19 Pusk	19 pusk
		4) Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	710 lok	715 lok
		5) Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	790 lok	825 lok
		6) Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	55 lok	60 lok

Sasaran/ Indikator Sasaran	Bidang / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Input)	Target 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
		7) Jumlah jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani	1.200 org	5988 orang
	c Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan			
		1) Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di sekolah/ madrasah	37.459 anak	189901
		2) Jumlah santri yang dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.591 santri	7981 santri
		3) Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 desa/ kel	132 desa/kel
		4) Jumlah desa siaga aktif mandiri	20 desa/ kel	23 desa/kel
		5) Jumlah publikasi Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9 kali	45 kali
	4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
		1) Cakupan Desa/kel. Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%
		2) Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%
	a Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana			
		1) Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	14.915 bayi	74055 bayi
		2) Jumlah desa/ kelurahan yang terpenuhi cakupan Universal Child Immunization (UCI)	132 Desa/kel	132 desa/kel
		3) Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 kejadian	2 kejadian
		4) Jumlah penemuan dan penanganan AFP	4 kasus	4 kasus
	b Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			
		1) Jumlah orang terduga Tuberculosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.430 kasus	10978 kasus
		2) Jumlah penderita TBC (semua kasus) yang diobati dan dilaporkan	1.931 kasus	2033 kasus
		3) Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19.262 kasus	19737 kasus
		4) Kasus baru DBD yang mendapatkan penanganan	100%	100%

Sasaran/ Indikator Sasaran	Bidang / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Input)	Target 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
		5) Jumlah sasaran lokasi penanganan dan penanggulangan penyakit DBD	60 lokasi	60 lokasi
	c	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		
		1) Jumlah usia produktif (15-59 th) yang mendapat pelayanan skrining kesehatan (skrining PTM) sesuai standar	577.866 orang	590928 orang
		2) Jumlah usia lanjut ( $\geq 60$ th) yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	87.919 orang	89906 orang
		3) Jumlah penderita hipertensi (usia $\geq 15$ th) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	231.693 orang	236931 orang
		4) Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia $\geq 15$ th yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.976 orang	18383 orang
		5) Jumlah Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.225 orang	2279 orang
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			100%	100%
	5	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		
		Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	91,30%	92,7%
	a	Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan		
		1) Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya	19 Pusk	19 puskesmas
		2) Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan kesehatan tim P3K	750 keg	750 keg
		3) Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan (UHC)	847.565 orang	875812 orang
		4) Jumlah klinik yang terakreditasi	3 klinik	12 klinik
		5) Jumlah pembangunan Rumah Sakit tipe D	1 unit	1 unit
		6) Jumlah renovasi/ rehabilitasi Puskesmas	1 unit	4 unit
		7) Jumlah pengadaan mobil ambulans, pusling roda 4, dan 2	4 unit	4 unit
	b	Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan		
		1) Jumlah jenis pengadaan obat, reagen, bahan kimia, BHP dan BMHP	5 jenis	5 jenis
		2) Jumlah lokasi dilakukan pengendalian dan pemantauan obat	20 lokasi	20 lokasi
		3) Jumlah item obat dan perbekalan yang ada (tersedia) sesuai dengan kebutuhan	162 item	165 item

Sasaran/ Indikator Sasaran	Bidang / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Input)	Target 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
	c	Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi		
		1) Jumlah sertifikat perijinan	2700 lembar	1400 lembar
		2) Pemeliharaan jaringan komputer, jaringan SIK, jaringan Sipedu dan sistem aplikasi Dinas Kesehatan	5 aplikasi	5 aplikasi
		3) Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	2 dok	2 dok
		4) Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan	120 IRT	120 IRT
		5) Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan menjadi nakes teladan	9 jenis	9 jenis
	d	Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan		
		1) Jumlah kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan ke Labkesda	6.190 orang	31231 orang
	e	Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		
		1) Jumlah indikator SPM yang tercapai 100%	12 indikator	12 indikator
	f	Pelayanan Kesehatan BLUD		
		1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas	778.298 orang	729.753 orang

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	76,51
		Angka Kematian Ibu (AKI)	59,27
		Angka Kematian Bayi (AKB)	7,3
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85

### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Adapun rincian alokasi anggaran untuk setiap sasaran strategis berdasarkan program kegiatan tertuang dalam table 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021

KODE REKENING	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>1.02.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota</b>	<b>23,753,476,032</b>
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>144,652,000</b>
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84,854,000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59,798,000
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19,243,006,000</b>
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,997,620,000
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	178,500,000
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66,886,000
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15,000,000</b>
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>491,958,000</b>
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,001,000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138,783,000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,751,000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168,970,000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,268,000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,999,000

1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112,186,000
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141,839,000</b>
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	141,839,000
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2,699,626,032</b>
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	619,168,000
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,712,000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,044,546,032
<b>1.02.01.2.0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,017,395,000</b>
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223,390,000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561,547,000
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	232,458,000
<b>1.02.02</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>261,544,251,818</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>36,277,992,118</b>
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5,205,197,540
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,150,849,900
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,139,985,000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19,068,090,000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2,037,463,000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2,930,698,950
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,383,735,000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	361,972,728
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>224,874,854,700</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,073,925,000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	272,410,750
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	130,187,570
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	371,750,000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	151,810,000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	360,858,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37,009,000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	57,387,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	245,279,000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	477,769,000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	25,829,605,000

1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	18,062,052,000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,092,081,680
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142,668,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	382,353,000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	605,212,000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	22,000,000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	209,375,000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14,793,000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14,800,000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	319,893,000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47,796,850,000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	10,000,000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	83,355,000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,371,840,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	112,956,352,200
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,393,014,500
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	973,720,000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	808,014,000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	608,491,000
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>171,897,000</b>
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	43,999,000
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	127,898,000
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>219,508,000</b>
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	22,448,000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	172,060,000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25,000,000
<b>1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>2,885,314,907</b>
<b>1.02.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>42,179,000</b>
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	42,179,000
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dab UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,561,697,907</b>
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2,547,647,907
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	14,050,000
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>281,438,000</b>
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	281,438,000



<b>1.02.04</b>	<b>Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	<b>428,750,000</b>
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>20,449,000</b>
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,449,000
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>213,540,000</b>
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	213,540,000
<b>1.02.04.2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>28,866,000</b>
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	28,866,000
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>13,958,000</b>
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	13,958,000
<b>1.02.04.2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>151,937,000</b>
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	117,397,000
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	34,540,000
<b>1.02.05</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>997,026,000</b>
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>188,267,000</b>
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	188,267,000
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>66,769,000</b>
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	66,769,000
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>741,990,000</b>
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	741,990,000
<b>JUMLAH</b>		<b>289,608,818,757</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/ kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip *good governance* dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandate suatu instansi dalam pelayanan *public* yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah tercapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik :  $\geq 91\%$ ;
- b. Baik : 76 – 90,99%;
- c. Cukup : 66 – 75,99%;
- d. Kurang : 51 – 65,99%;
- e. Sangat Kurang:  $\leq 50,99\%$ .

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat pencapaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\text{Rencana/target} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana/target})}{\text{Rencana/target}} \times 100 \%$$

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Utama Dinas Kesehatan

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2021

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,51	76,77	100
2		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100000 KH	59,27	150,95	-54,68
3		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7,3	6,75	107,53
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,6	0,29	45
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100	100	100
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	85	93,91	110,48

Sumber : laporan pemegang program kegiatan 2021

Berdasarkan tabel tersebut dari Indikator Kinerja Utama 50 % capaian masih dibawah target yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) – 54,68 dan Indeks Keluarga Sehat (IKS) 45%.

## 2. Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2021
1	Angka Kematian Ibu	65,97	59,27	52,78	150,95
2	Angka Kematian Bayi	8	7,3	6,9	6,75
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	18,00%	18,60%	4,5%
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	94,80%
5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	100%	91,54%
6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	96,25%
7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	91,30%	92,7%	105,26%

Dari tabel di atas, terdapat 7 (tujuh) indikator, 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 28,57% dari total program. Sementara itu, sebanyak 5 (enam) indikator atau sebesar 71,42% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan dengan persentase 94,58%, sementara indikator yang mengalami capaian yang terendah adalah indikator Angka Kematian Ibu dengan persentase 150,95%.

## 3. Capaian kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021

NO	INDIKATOR	Target	2021
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	94,86%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standar	100%	100%
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	98,63%
4	Presentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	82,90%

NO	INDIKATOR	Target	2021
5	Presentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	79,52%
6	Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
7	Presentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
8	Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
9	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
10	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
11	Presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	40,81%
12	Presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dari dua belas Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2021 tujuh indikator mengalami peningkatan (target tercapai), satu indikator tetap (target tercapai) dan empat indikator menurun (belum tercapai), meliputi presentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standard mencapai 98,63% hal ini dikarenakan terjadi kasus kematian pada bayi baru lahir mulai dari usia kurang dari tujuh hari 94 bayi dengan berbagai faktor penyebab. Penyebab tertinggi karena asfiksia sebanyak 37,68%, BBLR 31,88%, kelainan kongenital 21,73% dan lain lain 8,69% sehingga tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan bayi baru lahir yaitu sampai kunjungan ke 3, presentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yaitu 79,52% dikarenakan sejak bulan Maret 2019 sampai saat ini terjadi perubahan metode pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang klasikal berubah menjadi metode dalam jaringan ( daring) sehingga tidak terjadi proses tatap muka karena pembelajaran dilaksanakan diluar gedung yaitu dirumah siswa sehingga pelayanan skrining kesehatan dimana siswa/ peserta didik sebagai sasaran kategori usia pendidikan dasar belum berjalan secara optimal sehingga kegiatan skrining dilaksanakan secara daring dengan melibatkan petugas UKS bekerjasama dengan guru , presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar 40,81%, hal ini diakibatkan ada pembatasan karena pandemik covid 19 yang beresiko terhadap penularan kasus, kurangnya

kesadaran masyarakat yang mengalami tanda gejala TB awal untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan merasa khawatir dikarenakan situasi pandemic Covid 19 serta koordinasi lintas program maupun sektoral yang belum optimal namun untuk penanganan kasus TB tetap dilaksanakan sesuai dengan jumlah penderita, dan presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemik covid, namun secara keseluruhan Standar Pelayanan Minimal 91,39 % pelayanan sudah capaian memenuhi target.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4. Kategori capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2021

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber data
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,51	76,77	100	Sangat Baik	BPS
2		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100000 KH	59,27	150,95	-54,68	Sangat kurang	Bidang Kesehatan Masyarakat ( Seksi Kesga Gizi)
3		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7,3	6,75	107,53	Sangat baik	
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,6	0,29	45	Sangat Kurang	Bidang Pelayanan Kesehatan ( Seksi Pelayanan Kesehatan)
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100	100	100	Sangat Baik	
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	85	77,28	93,91	Baik	Sekretariat ( sub bagian PEPK)

Dari tabel diatas 3 (empat) dari 6 (enam ) indikator kinerja utama yaitu 50% dengan kategori sangat baik, 16,6 % baik dan 33,4% sangat kurang.

Adapun analisis dari capaian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Angka Harapan Hidup

Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang. Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kudus tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 relatif tetap, bila dibandingkan dengan target 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,11% . Hal ini menunjukkan tidak ada perubahan angka harapan hidup secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah dampak kejadian pandemi covid 19 berakibat terjadinya peningkatan angka kesakitan pada seluruh masyarakat terutama golongan usia rentan dan masa krisis.

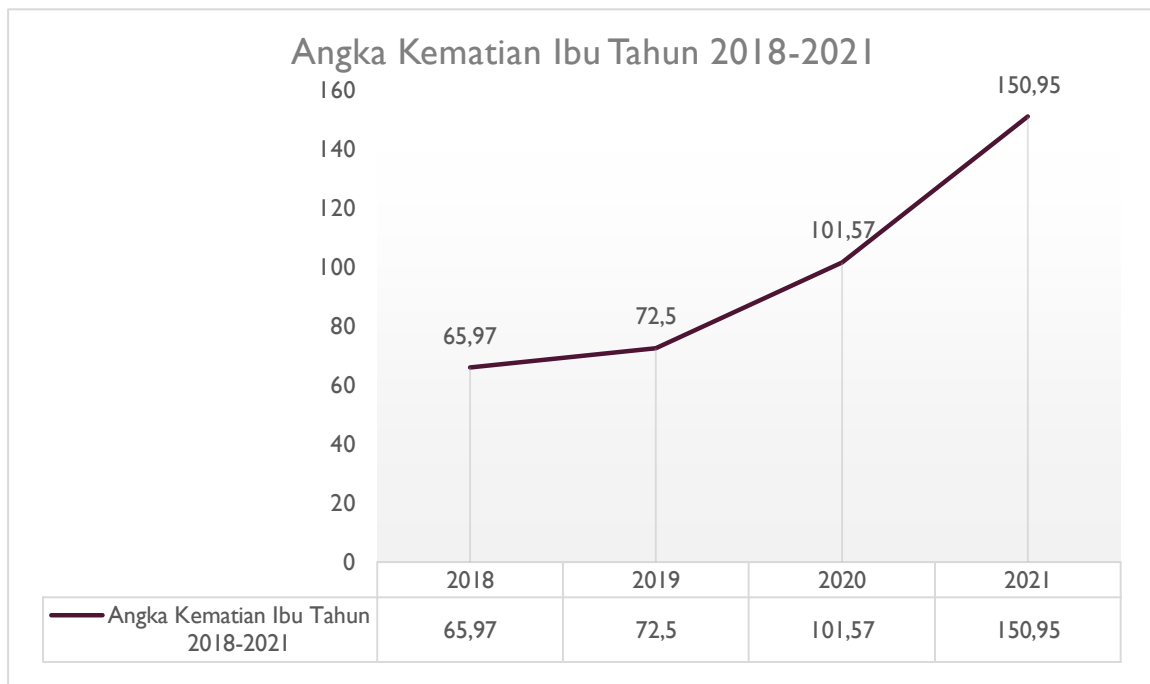
Upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian angka harapan hidup adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai sektor yang tertuang dalam program kegiatan pada bidang kesehatan masyarakat meliputi gizi masyarakat dan kesehatan keluarga, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, surveilan dan Imunisasi serta Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa serta bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi perijinan, sertifikasi, farmasi, perbekalan kesehatan, manajemen informasi, dan pengembangan kesehatan serta Pelayanan dan pembiayaan kesehatan

b. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh bagi semua pihak.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kudus dalam lima tahun terakhir berada di bawah angka nasional dan dibawah target yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah. Gambaran AKI selama lima tahun dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada diagram 3.1 dibawah ini:

Diagram 3.1 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kudus Tahun 2016 - 2020



Berdasarkan data tersebut diatas Angka Kematian Ibu Tahun 2021 bila dibandingkan target 59,27 meningkat sangat signifikan yaitu 150,95 ( 21 kasus) dengan capaian -54,68 yang artinya sangat kurang . Penyebab kematian terbanyak karena terkonfirmasi covid 19 yaitu 17 kasus (80,95%), 4 kasus (19,04%) karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu Pre Eklamsia, Eklamsia, Penyakit Jantung Bawaan dan TBC.

Kematian ibu akibat persalinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Kematian ibu akibat persalinan itu tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan ibu saja tapi faktor eksternal Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2020 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% tapi di Kudus tahun 2020 naik menjadi 28%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis, leukemia , SLE , hipertensi serta diperburuk oleh kejadian pandemic covid 19. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan. Untuk itu konsep safe motherhood pilar pertama harus dikuatkan yaitu “Keluarga Berencana”, memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan. Penanganan kasus kematian ibu memerlukan kerjasama yang baik lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan



kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten, sesungguhnya kematian ibu yang terjadi sebagian besar penyebabnya masih bisa dicegah jika semua pihak sepakat dan berbuat untuk upaya penurunan kematian ibu baik dari masyarakat, fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan termasuk dukungan sarana dan tenaga yang kompeten. Penyebab kematian ibu di kabupaten kudas antara lain perdarahan, eklamsi, infeksi dan penyebab non obstetrik, dimana perdarahan merupakan penyebab terbanyak yaitu 25% pada tahun 2014, 20% tahun 2015, 18 % tahun 2016, 23,91% pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 49% dan pada tahun 2019 36,36 % , namun untuk tahun 2020 ini penyebab kematian terbanyak akibat terkonfirmasi covid 19 sebanyak 8 kasus yaitu 53,33%. Tahun 2021 dari 21 kasus, penyebab kematian tertinggi karena terkonfirmasi covid 19 sebanyak 17 kasus (80,95 %) , hanya 4 kasus (19,04 %) karena Pre Eklamsi, Elkamsi, Penyakit jantung dan TBC.

Kemampuan tenaga kesehatan dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi secara dini adanya faktor risiko baik melalui pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti laboratorium sesuai standar harus dipenuhi bagi setiap ibu hamil, yang merupakan haknya, termasuk juga kemampuan penanganan kegawatdaruratan Obstetri baik pada penanganan fasilitas pelayanan tingkat piertaman maupun fasilitas pelayanan tingkat lanjut.

#### c. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung fluktuatif tapi masih lebih rendah dibandingkan target nasional yaitu 23 per 1000 kh. Hal ini merupakan dampak dari tingginya ibu hamil resiko tinggi yang melebihi standart nasional 20% tapi di Kabupaten Kudus sebesar 28%. Penyebab kematian bayi tertinggi disebabkan kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. Penyebab BBLR adalah persalinan sebelum waktunya atau prematur, disamping itu kasus yang lain adalah asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), dan kelainan kongenital juga masih cukup tinggi di Kabupaten Kudus. Tahun 2020 angka kematian bayi 8,26 / 1000 kh menurun 1,51 pada tahun 2021 menjadi 6,75 /1000 kh dengan capaian 107,53 %.

#### d. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila  $IKS > 0,800$ ; 2) Keluarga Pra Sehat, bila  $IKS = 0,500 - 0,800$ ; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila  $IKS < 0,500$  adapun 12 indikator keluarga sehat terdiri dari : keluarga yang mengikuti keluarga berencana, persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat

imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, pertumbuhan balita dipantau, penderita TB paru berobat sesuai standard, penderita hipertensi berobat teratur, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai saran air bersih dan keluarga menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga sehat kabupaten kudu perhitungan Indeks Keluarga Sehat dari 12 indikator keluarga sehat yang dilaksanakan di 9 kecamatan adalah sebagai berikut keluarga yang mengikuti keluarga berencana 26,41%, persalinan di fasilitas kesehatan 94,94 %, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 91,64 %, bayi mendapat ASI eksklusif 64,68 %, pertumbuhan balita dipantau 83,95 %, penderita TB paru berobat sesuai standard 55,33 %, penderita hipertensi berobat teratur 17,47 %, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati 38,61 %, anggota keluarga tidak ada yang merokok 51,00 %, keluarga sudah menjadi anggota JKN 61,25 %, keluarga mempunyai saran air bersih 98,64 % dan keluarga menggunakan jamban sehat 97,89 % sehingga total IKS 0,29 artinya status kesehatan masyarakat kudu dikategorikan tidak sehat. Indeks Keluarga Sehat Tahun 2021 yaitu 0,29 , kondisi ini dibawah target yang diharapkan yaitu 0,6. Hal ini sebagai dampak PPKM sehingga kader dan petugas belum dapat melakukan survey secara optimal dan masih kurangnya koordinasi lintas sectoral dan pemberdayaan masyarakat.

e. Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi

Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi dari 19 puskesmas yang melaksanakan reakreditasi di kabupaten kudu 100 % mengalami peningkatan strata akreditasinya, hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan mengalami kemajuan yang sangat signifikan, namun penguatan kegiatan akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tetap perlu dilakukan karena merupakan salah satu komponen dalam mempertahankan kualitas mutu pelayanan publik bidang kesehatan karena berhubungan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2021 kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendampingan agar status akreditasi yang telah tercapai pada periode reakreditasi sebelumnya tidak mengalami penurunan kualitas pelayanan, dikarenakan secara kumulatif dari 19 Puskesmas yang telah mengikuti reakreditasi mengalami peningkatan status akreditasi.

f. Nilai evaluasi SAKIP

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2020 Dinas Kesehatan memperoleh nilai 77,28. Hal ini masih dibawah target yang diharapkan yaitu 82 pada tahun 2020 dan 85 pada tahun 2021. Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi Dinas Kesehatan termasuk kategori BB artinya kinerja dinas kesehatan yang meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sangat baik.

Sebagai tolok ukur kinerja organisasi yang lain adalah capaian kinerja urusan kesehatan terhadap target RKPD seperti tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 3.5 Status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2021	Status thdp Target RKPD Tahun 2021	Status thdp Target Akhir RPJMD 2023
1.	Angka Kematian Ibu	65,97	59,27	52,78	150,95	Tidak tercapai	Tidak tercapai
2.	Angka Kematian Bayi	8	7,3	6,9	6,75	Tercapai	Telah tercapai
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	18,00%	18,60%	4,5%	Tercapai	Telah tercapai
4.	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	91,18%	Tidak tercapai	Akan dicapai
5.	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	100%	91,54%	Tidak tercapai	Akan dicapai
6.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	96,25%	Tidak tercapai	Akan tercapai
7.	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	91,30%	92,7%	73%	Tidak Tercapai	akan tercapai

Berdasarkan data tersebut 71,42 % status capaian kinerja terhadap RPJMD belum tercapai yaitu Angka Kematian Ibu, cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, cakupan pelayanan pengendalian penyakit dan cakupan pelayanan sumber daya kesehatan.

Adapun penerapan kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang diamanatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten seperti tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR	Target	2021	Status
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	94,86%	Belum tercapai
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standar	100%	100%	Tercapai
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	98,63%	Belum tercapai
4	Presentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	82,90%	Belum tercapai
5	Presentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	79,52%	Belum tercapai
6	Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	Tercapai
7	Presentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	Tercapai
8	Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Tercapai
9	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Tercapai
10	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	Tercapai
11	Presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	40,81%	Belum tercapai
12	Presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%	100%	Tercapai

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 41,66 % belum tercapai terutama persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan. Dengan situasi pandemi covid 19 ini, terjadi perubahan metode pelacakan kasus yang semula *aktif promotive case finding* menjadi *pasif promotive case finding*, sehingga yang datang ke fasilitas pelayanan hanya yang benar benar bergejala berat dan membutuhkan pengobatan. Sedangkan yang masih menunjukkan gejala awal lebih memilih dirumah akibat khawatir dianggap terpapar covid 19. Berbagai upaya penguatan promosi STOP TB telah dilakukan dengan metoda TOSS yaitu Temukan kasus Obati Sampai Sembuh, jejaring kemitraan serta *bridging system* pelaporan TB untuk sinkronisasi monitoring dan evaluasi kasus.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun).

Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2021

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2019			Capaian Kinerja Tahun 2020			Capaian Kinerja Tahun 2021		
				target	realisasi	capaian (%)	target	realisasi	capaian (%)	target	realisasi	capaian (%)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,48	76,46	100	76,49	76,60	100	76,51	76,77	100
2		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100000 KH	65,97	72,9	89	59,27	101,57	28,63	59,27	150,95	-54,68
3		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7,8	8,15	95	7,5	8,26	89,86	7,3	6,75	107,53
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,3	0,22	73	0,5	0,25	50	0,6	0,29	45
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	76,64	74,73	94	82	77,28	91,13	85	93,91	110,48

Berdasarkan perbandingan capaian indikator utama 3 tahun terakhir belum menunjukkan progres peningkatan yang signifikan, Rata rata persentase capaian tahun 2019 yaitu 91,83% menurun 0,09 pada tahun 2020 menjadi 76,60 % dan pada tahun 2021 menjadi 64,79 %. Indikator yang paling berpengaruh terhadap capaian kinerja 2021 adalah Angka Kematian Ibu yang mengalami lonjakan kasus yang signifikan dari 15 kasus pada tahun 2020 menjadi 21 kasus pada tahun 2021 dengan kategori sangat buruk, dari 21 kasus, 17 kasus (80,19%) terkonfirmasi covid. Hal ini diperburuk dengan kapasitas ruang layanan persalinan pada RS Rujukan Covid -19 terbatas, sehingga mengalami keterlambatan penanganan.

Upaya yang dilakukan yaitu penguatan puskesmas dan jaringannya untuk melakukan deteksi dini faktor resiko dan *triple covid*, penguatan manajemen program dan sistem rujukan, peningkatan peran serta masyarakat, penguatan kemitraan dan kerjasama, penguatan akselesari dan inovasi dengan cara optimalisasi aplikasi Si Bulan dengan rujukan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten dan provinsi serta audit maternal dan neonatal yang berkelanjutan.

Tabel 3.8 Perbandingan Status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

No	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi 2019	Target Tahun 2020	Realisasi 2020	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Status thdp Target RKPD Tahun 2021	Status thdp Target Akhir RPJMD 2023
1	Angka Kematian Ibu	65,97	65,97	72,90	59,27	101,57	59,27	150,95	52,78	Tidak tercapai	Tidak Tercapai
2	Angka Kematian Bayi	8	7,8	8,15	7,5	8,26	7,3	6,75	6,9	Tercapai	tercapai
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	19,00 %	4,7%	18,94%	4,6%	18,00%	4,5%	18,60%	Tercapai	Telah tercapai
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	96,8%	100%	86,26%	100%	91,18%	100%	Tidak tercapai	Akan dicapai
5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	69,6%	100%	55,01%	100%	91,54%	100%	Tidak tercapai	Akan dicapai
6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	99%	100%	100%	100%	96,25%	100%	Tidak tercapai	Akan tercapai
7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	90,00 %	97,65%	91,30%	94,58%	91,30%	105,26%	92,7%	Tercapai	Telah tercapai

Dari tabel tersebut perbandingan tiga tahun terakhir mengalami penurunan capaian kinerja terutama pada indikator Angka Kematian Ibu yaitu dari 72,90 pada tahun 2019 meningkat pada tahun 2020 menjadi 101,57 dan meningkat menjadi 150,95 pada tahun

2021. Hal tersebut diakibatkan dari 21 kasus kematian ibu 17 kasus karena terkonfirmasi covid-19 , 5 kasus karena penyulit pada kehamilan dan persalinan.

Tabel 3.9 Perbandingan Tiga tahun terakhir status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR	Target	2019	2020	2021	Status
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	95,32%	95,97%	94,86%	Belum tercapai
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan peralihan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	98,86%	99,69%	98,63%	Belum tercapai
4	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	91,20%	100%	82,90%	Belum tercapai
5	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	99,88%	52,83%	79,52%	Belum tercapai
6	Persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	13%	100%	100%	Tercapai
7	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	21%	100%	100%	Tercapai
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	22%	100%	100%	Tercapai
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	108%	119%	100%	Tercapai
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	50%	100%	100%	Tercapai
11	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	41,46%	40,81%	Belum tercapai
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%	100%	90,91%	100%	Tercapai

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10 Perbandingan Tiga tahun terakhir status Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2018	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Angka Kematian Ibu	65,97	59,27	150,95	52.780	-86	-138.78
2	Angka Kematian Bayi	8	7,3	6,75	6.900	102	95.1
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	19,05%	18,00%	4,5%	18.60	176	157.4
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	94,80%	100	94.80	-5.2
5	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	91,54%	100	91.54	-8.46
6	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	96,25%	100	96.25	-3.75
7	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	90,00%	91,30%	105,26%	93	88.10	-4.9

Berdasarkan tingkat kemajuan capaian terhadap RPJMD yang paling menonjol adalah keberhasilan capaian penurunan prevalensi stunting yaitu 157,4 sedang yang paling sulit tercapai bahkan tidak dapat terpenuhi adalah penurunan Angka Kematian Ibu dengan tingkat kemunduran 138,78, sehingga perlu komitmen lintas sektoral dan lintas program.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Penyebab rendahnya capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah indikator Angka Kematian Ibu yang mencapai – 54,68% dengan angka kematian kasus 21 kasus dan realisasi mencapai 150.95 / 100000 kh, lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi yaitu 199/ 100000 kh, menduduki urutan ke 15 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Lonjakan AKI tahun 2020 dan 2021 ini diperkirakan karena risiko infeksi dan keterbatasan layanan maternal saat pandemic, sehingga kejadian covid 19 memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap kasus kematian ibu

Berbagai upaya telah dilakukan meliputi meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi baru lahir berupa peningkatan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x,



persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir berupa penguatan antenatal, persalinan dan post natal sesuai standar, penempatan SDM berkualitas, ketersediaan UTD/Bank Darah RS di tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat:pemanfaatan buku KIA, revitalisasi posyandu, kelas ibu, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi tata kelola program,tata kelola klinis dan tata kelola manajemen, dan peningkatan peran keluarga , lintas sector dalam memantau kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.11 Analisis dan Solusi terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis keberhasilan /kegagalan	Solusi keberhasilan /kegagalan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,51	76,77	100	Usia harapan hidup relatif tetap , hanya meningkat 0,11% karena angka kesakitan meningkat sehubungan dengan pandemi covid 19	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan satgas covid 19</li> <li>Penerapan prokes dalam semua aspek</li> <li>Penerapan PHBS dalam perilaku</li> <li>Penguatan germas di lingkungan keluarga</li> <li>Penguatan kegiatan testing, tracing ,treatment</li> <li>Optimalisasi Vaksin, logistik</li> <li>Peningkatan kapasitas petugas(SDM)</li> </ol>
2		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100000 KH	59,27	150,95	-54,68	Melebihi target karena pandemi berdampak besar bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil Kategori sangat buruk, dari 21 kasus , 17 kasus (80,19%) terkonfirmasi covid 19 Kapasitas ruang layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan puskesmas dan jaringannya</li> <li>Penguatan manajemen program dan sistem rujukan</li> <li>Peningkatan peran serta masyarakat</li> </ol>

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis keberhasilan /kegagalan	Solusi keberhasilan /kegagalan
3							persalinan pada RS Rujukan covid-19 terbatas, Banyak ibu hamil dan ibu bersalin terpapar covid-19 dari 21 kasus kematian ibu 17 terpapar covid, 4 kasus murni karena komplikasi kehamilan dan persalinan	4 Penguatan kerjasama dan kemitraan 5 Penguatan akselerasi dan inovasi dengan cara Optimalisasi aplikasi SI BULAN dalam rangka percepatan sistem rujukan terintegrasi aplikasi PSC 119 6 Audit Kematian Ibu dan Bayi
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7,3	6,75	107,53	Kategori baik ,dari 94 kasus, disebabkan karena BBLR 26 %, Asfiksia 20 %, Kelainan kongenital 11 % .3,19 % terkonfirmasi covid 19 dan lain lain 39,81 %,	7 Edukasi tentang 5 M, <i>screening covid pada</i> ibu hamil dengan Rapid Antigen
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,6	0,29	45	Kategori sangat buruk , karena berdasarkan IKS termasuk keluarga tidak sehat  Kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana karena pandemi Covid 19 belum berakhir, sehingga fokus intervensi Puskesmas lebih di prioritaskan untuk Penanganan Covid-19.	1 Merencanakan peningkatan kapasitas pengelola program puskesmas dalam pengolahan dan integrasi data program dengan data PISPK (pertemuan)  2 Bimbingan teknis secara intensif kepada 19 Puskesmas (Pembinaan terintegrasi oleh pembina Fasyankes tingkat Kabupaten)

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis keberhasilan /kegagalan	Solusi keberhasilan /kegagalan
								3 Update data secara off line secara rutin (untuk back up apabila terjadi kendala pada Aplikasi KS-Online)  4 Penguatan intervensi lanjut dan kunjungan keluarga untuk peningkatan IKS
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	%	100	100	100	Kategori sangat baik, karena secara kumulatif seluruh puskesmas sudah terakreditasi	Pendampingan secara berkala serta monitoring pelayanan secara berkesinambungan
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	85	77,28	93,91	Kategori baik, dengan nilai BB	1 Peningkatan dan perbaikan aspek penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja  2 Komitmen bersama serta penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektoral
							Kurangnya komitmen dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral	

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Reallisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat									
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	95.26	114.77	23,753,476,032	20,475,905,115	86.20	28.57

No	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat ( persentase pelayanan kesehatan ibu hamil,ibu bersalin,bayi baru lahir, balita dan usia pelayanan dasar )	100	91.18	91.18	167,689,102,818	121,395,131,432	72.39	18.79
		Cakupan pelayanan pengendalian penyakit ( persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif,usia lanjut, diabetes melitus, orang terduga ODGJ berat,orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV	100.00	91.54	91.54	94,852,175,000	60,301,745,263	63.57	27.97
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan (persentase cakupan pelayanan dasar masyarakat, ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, pelayanan perijinan, sertifikasi dan pemetaan SDM Kesehatan )	91.30	73	79.96	3,314,064,907	846,463,338	25.54	54.41
					94.36	289,608,818,757	203,019,245,148	70.10	24.26

Berdasarkan tabel diatas tingkat efesiensi anggaran terhadap capaian kinerja pada tahun 2021 mencapai 24,26 %, meningkat sebesar 19,22 % dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 5,04

%. Hal ini didukung dengan ada program kegiatan dan sub kegiatan yang saling menunjang antar bidang dan seksi untuk tercapainya kinerja organisasi yang meliputi Indikator Kinerja Utama sesuai visi, misi serta peran fungsi organisasi, yang tergambar pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ tidak menunjang		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	114.77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	114.77	Menunjang		
	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	91.18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil	94,86	Menunjang		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	100	Menunjang		
					Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	98,63	Menunjang		
					Persentase pelayanan kesehatan pada balita	82,90	Menunjang		
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	79,52	Menunjang		
					Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	91.54	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut				100	Menunjang
				Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi				100	Menunjang
				Persentase pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus				100	Menunjang
				Persentase pelayanan kesehatan pada penderita				100	Menunjang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
					ODGJ		
					Persentase pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC	40,81	Menunjang
					Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi virus HIV	100	Menunjang
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan (persentase cakupan pelayanan dasar masyarakat, ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, pelayanan perijinan, sertifikasi dan pemetaan SDM Kesehatan )	79.96	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pelayanan dasar masyarakat	80.00	Menunjang
persentase pelayanan perijinan dan sertifikasi					47.11	Menunjang	
persentase pemetaan SDM kesehatan					100.00	Menunjang	
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	116.67	Menunjang	

### C. REALISASI ANGGARAN

Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain sumber daya manusia dalam menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kudus.

Adapun realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	23,753,476,032	20,475,905,115	86.20%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			144,652,000	67,212,500	46.46%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,243,006,000	16,662,154,109	86.59%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	(%)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15,000,000	0	0.00%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			491,958,000	328,971,658	66.87%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			141,839,000	141,542,000	99.79%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,699,626,032	2,375,625,343	88.00%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,017,395,000	900,399,505	88.50%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	261,544,251,818	181,282,327,195	69.31%
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	36,277,992,118	20,375,151,099	56.16%
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	224,874,854,700	160,638,741,596	71.43%
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100%	171,897,000	106,930,000	62.21%
3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	219,508,000	161,504,500	73.58%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	91.3%	2,885,314,907	718,825,138	24.91%
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			42,179,000	7,398,500	17.54%
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dab UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2,561,697,907	614,390,638	23.98%
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota			281,438,000	97,036,000	34.48%
4	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	91.3%	428,750,000	127,638,200	29.77%
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			20,449,000	0	0.00%
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			213,540,000	45,533,500	21.32%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	(%)
3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			28,866,000	17,690,000	61.28%
4	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			13,958,000	10,109,000	72.42%
5	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			151,937,000	54,305,700	35.74%
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	997,026,000	414,549,500	41.58%
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			188,267,000	139,231,000	73.95%
2	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			66,769,000	20,645,000	30.92%
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			741,990,000	254,673,500	34.32%
				289,608,818,757	203,019,245,148	70.10%

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 yang awalnya total belanja sebesar Rp 289.608.818.757. Realisasi serapan Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebesar Rp. 203.019.245.148 ( 70,10 % ).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2021 merupakan capaian antara dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama, 3 (tiga) indikator mencapai kriteria sangat baik yaitu 50% , 1 (satu) indikator baik, 2 (dua) indikator sangat kurang.
3. Capaian kinerja berdasarkan indikator program 94,36% dengan tingkat efisiensi sebesar 24,26 %.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas program yang efektif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KESEHATAN**

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax -

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Jabatan : Plt. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kudus, 21 Januari 2021

Pihak Pertama,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Pembina

NIP. 19731006 200501 2 009


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Angka Harapan Hidup ( AHH ) 2) Angka Kematian Ibu 3) Angka Kematian Bayi	76,51 59,27 7,30
2.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Indek keluarga sehat	0,60
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Prosentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	100 %
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus	Rp. 19.388.967.916	APBD dan DBHCHT
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 67.775.026.280	APBD, DBHCHT dan Pajak Rokok
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 508.676.907	Pajak Rokok
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 260.063.000	Pajak Rokok
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.968.465.000	DBHCHT dan Pajak Rokok

Kudus, 21 Januari 2021

 **Pt. BUPATI KUDUS**  
**WAKIL BUPATI,**  
**Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH**

**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN**  
**SUMBER DAYA KESEHATAN,**  
  
**dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes**  
**Pembina**  
**NIP. 19731008 200501 2 009**





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KESEHATAN**

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BADAI ISMOYO, S.KM, M.M

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Jabatan : Plt. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 26 April 2021

Pihak Kedua,  
  
HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Pihak Pertama,  
  
BADAI ISMOYO, S.KM, M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196512221987031006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUDUS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	7,30 per seribu
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	76,51 Thn
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	59,27 per 100.000 kh
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas dengan peningkatan status akreditasi	100,00 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.388.967.668	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	172.455.724.061	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	508.676.907	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	260.063.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.968.465.000	
<b>TOTAL</b>		<b>194.581.896.636</b>	

Kudus, 26 April 2021

  
 PIR. BUPATI KUDUS  
 WAKIL BUPATI  
 HM. HARTOPO, ST, MM, MH

KEPALA DINAS KESEHATAN  
  
 BADAI ISMOYO, S.KM, M.M  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196512221987031006



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KESEHATAN

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311  
Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030  
Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id) Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : MUSTIANIK, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, Januari 2021

PIHAK KEDUA,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes  
Pembina  
NIP. 19731008 200501 2 009

PIHAK KESATU,

MUSTIANIK, SE  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660612 199403 2 009



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 231.500.000,00	Sumber anggaran dari pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 13.518.741.248,00	Sumber anggaran dari PAD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.335.000.000,00	Sumber anggaran dari PAD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 666.378.000,00	Sumber anggaran dari PAD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 141.839.000,00	Sumber anggaran dari PAD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.425.394.668,00	Sumber anggaran dari PAD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.070.115.000,00	Sumber anggaran dari PAD

Kudus, Januari 2021  
PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

  
dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes  
Pembina

  
MUSTIANIK, SE  
Pembina Tk. I

NIP. 19731008 200501 2 009

NIP. 19660612 199403 2 009





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KESEHATAN

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311  
Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030

Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id) Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua,

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kepala Bidang Pelayanan dan  
Sumber Daya Kesehatan,

**dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes**

NIP.19731008 200501 2 009

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pelayanan dan  
Sumber Daya Kesehatan

**dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes**

NIP.19731008 200501 2 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS  
ESELON IV**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase (%) cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%
		Prosentase (%) cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100%
		Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	829.272 Jiwa
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang meningkat status Akreditasinya	14 Pusk
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi puskesmas	2 Pusk
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan yang mendapatkan pelayanan Tim P3K	500 Keg
		Jumlah Layanan Kegawatdaruratan PSC 119/ U-Garuda	1000 Keg
5	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah PKS dengan Rumah Sakit untuk Pelayanan Rujukan	7 Dokumen
6	Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan	Jumlah hibah uang untuk ambulance Rumas Sakit Swasta	1 Paket
7	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja (SPM Kesehatan), profil kesehatan serta terlaksananya laporan online	3 Dokumen
		Jumlah dokumen profil sumber daya manusia kesehatan (SDMK)	1 Dokumen
8	Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pembayaran jasa jaringan internet Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	12 Bulan



10	Kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perizinan	9 Lokasi
11	Kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah praktik mandiri dokter, perawat, bidan, terapis yang memenuhi izin sesuai standar	171 Lokasi
		Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat perizinan	1200 Orang
12	Kegiatan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya koordinasi dan monitoring tenaga kesehatan non PNS	9 Kecamatan
13	Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan rencana kebutuhan tenaga kesehatan	1 Dokumen
		Jumlah pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan ASN di lingkup Dinas Kesehatan, UPT/UPTD dan RSUD	2 Kali
14	Kegiatan pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang dilakukan pembinaan dan sertifikasi	100 IRT
15	Kegiatan Pemeriksaan Post-Market paket produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah pemeriksaan produk makanan minuman yang beredar	100 Lokasi
16	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikasi perizinan industri rumah tangga	100 Lokasi

17	Tersedianya sarana, prasarana, obat dan pembekalan kesehatan	Jumlah pengadaan penunjang farmasi dan perbekes	3 Jenis
		Jumlah pengadaan/pemeliharaan alat penunjang farmasi obat instalasi farmasi	8 Jenis

Kegiatan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (1.02.02.2.01.09)	Rp. 7.568.977.800,-	Pajak Rokok Februari - Desember
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1.02.02.2.02.26)	Rp. 47.796.850.000,-	Januari – Desember
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (1.02.02.2.04.04)	Rp. 25.000.000,-	DBHCHT Januari – Desember
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (1.02.02.2.02.35)	Rp. 216.435.000,-	Februari – Desember
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (1.02.02.2.04.03)	Rp. 350.000.000,-	DBHCHT Februari – Desember
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1.02.02.2.01.19)	Rp. 583.735.000,-	Pajak Rokok Januari – Desember
Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan (1.02.02.2.01.12)	Rp. 600.000.000,-	APBD Februari - Agustus
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (1.02.02.2.03.01)	Rp. 43.999.000,-	Pajak Rokok Januari - Desember
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (1.02.02.2.03.03)	Rp. 127.898.000,-	Pajak Rokok Januari-Desember
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D (1.02.02.2.04.01)	Rp. 22.448.000,-	Pajak Rokok Februari - Oktober



Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan (1.02.03.2.01.02)	Rp.	42.179.000,-	Pajak Rokok Januari - Desember
Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar (1.02.03.2.02.02)	Rp.	367.648.000,-	Pajak Rokok Januari
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1.02.03.2.02.03)	Rp.	14.050.000,-	Pajak Rokok Februari - Oktober
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota (1.02.03.2.03.01)	Rp.	84.800.000,-	Pajak Rokok April - Oktober
Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (1.02.04.2.03.01)	Rp.	117.374.000,-	Pajak Rokok Februari - Oktober
Kegiatan Pemeriksaan Post-Market paket produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan (1.02.04.2.06.01)	Rp.	36.399.000,-	Pajak Rokok April - Oktober
Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Rp.	34.540.000,-	Pajak Rokok November

Pengadaan Bahan Habis Pakai (1.02.02.2.01.17)	Rp. 689.270.000,-	DBHCHT Januari-Desember
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1.02.02.2.01.20)	Rp. 204.998.728,-	Pajak Rokok Januari-Desember

Kudus, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kepala Bidang Pelayanan dan  
Sumber Daya Kesehatan,



**dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes**  
NIP.19731008 200501 2 009

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelayanan dan  
Sumber Daya Kesehatan



**dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes**  
NIP.19731008 200501 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KESEHATAN

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311  
Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030  
Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id) Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M. Kes  
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, Januari 2021

PIHAK KEDUA,  
PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN  
SUMBER DAYA KESEHATAN

dr. ANDINI ARIDEWI, M. Kes  
Pembina  
NIP.19731008 200501 2 009

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM  
Pembina  
NIP. 19700406 199003 1 004




**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TERGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %
		Jumlah Bayi Umur 0-11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100 %
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit AFP Rate per 100.000 Penduduk < 15 th	100 %
		Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100 %
		Penderita DM yang Ditangani Sesuai Standart	100 %
		Penderita Hipertensi Ditangani sesuai Standart	100 %
		Penderita Jiwa Ditangani Sesuai Standart	100 %
		Skrining FR PTM pada penduduk usia produktif (15-59) tahun	100 %
		Skrining FR PTM pada penduduk usia lansia ( $\geq 60$ th)	100 %
		Cakupan penemuan dan penanganan TBC	100 %
		Cakupan Penemuan dan penanganan HIV	100 %
		Cakupan dan penemuan penanganan DBD	100 %
		Cakupan RFT Kusta	< 90 %
		Cakupan penemuan dan penanganan diare	100 %
		cakupan dan penanganan pneumonia	100 %



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Penyakit, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Rp.110.000.000	Sumber Anggaran DBHCHT
2	Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Penyakit, Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp.10.000.000	Sumber Anggaran Pajak Rokok
3	Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Penyakit, Kegiatan Investigasi Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Rp.2.603.394.000	Sumber Pajak Rokok + DBHCHT
4	Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Penyakit, Kegiatan Pengelolaan Surveilans	Rp.182.450.000	Sumber Anggaran Pajak Rokok
5	Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Penyakit, Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp.80.000.000	Sumber Anggaran Pajak Rokok
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Rp.3.363.008.000	Sumber Anggaran DAK Fisik
7	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Rp.125.000.000	Sumber Anggaran DAK Non Fisik
8	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Rp.266.995.000	Sumber Anggaran DBHCHT
9	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Rp.262.500.000	Sumber Anggaran Pajak Rokok
10	Program Pencegahan dan Penyakit Tidak Menular	Rp.107.837.000	Sumber Anggaran Pajak Rokok
11	Program Pencegahan dan Penyakit Tidak Menular	Rp.183.525.000	Sumber Anggaran DBHCHT

ATASAN LANGSUNG  
 PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN  
 SUMBER DAYA KESEHATAN



**dr. Andini Aridewi, M. Kes**  
 Pembina  
 NIP. 19731008 2005001 2 009

Kudus, Januari 2021  
 KEPALA BIDANG P2P  
 DINAS KESEHATAN



**Mokhammad Nasiban, SKM, MM**  
 Pembina  
 NIP. 19700406 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KESEHATAN  
Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311  
Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030  
Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id) Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BADAI ISMOYO, SKM, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

BADAI ISMOYO, SKM, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651222 198703 1 006

Kudus, 26 April 2021

PIHAK PERTAMA,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Pembina

NIP. 19731008 200501 2 009



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83

NO


KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 231.500.000,00	Sumber anggaran dari pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 48.866.980.000,00	Sumber anggaran dari PAD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.335.000.000,00	Sumber anggaran dari PAD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 666.378.000,00	Sumber anggaran dari PAD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 141.839.000,00	Sumber anggaran dari PAD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.628.234.668,00	Sumber anggaran dari PAD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.041.695.000,00	Sumber anggaran dari PAD

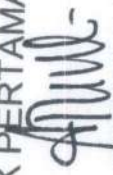
PIHAK KEDUA,

  
BADAI ISMOYO, SKM, MM  
 Pembina Tk. I

NIP. 19651222 198703 1 006

Kudus, 26 April 2021

PIHAK PERTAMA,

  
dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes  
 Pembina

NIP. 19731008 200501 2 009

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83

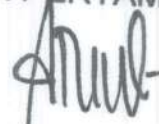
PIHAK KEDUA,



BADAI ISMOYO, SKM, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651222 198703 1 006

Kudus, 26 April 2021

PIHAK PERTAMA,



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes  
Pembina  
NIP. 19731008 200501 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KESEHATAN

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311

Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030

Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id) Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. EDI KUSWORO

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BADAI ISMOYO, SKM, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 26 April 2021

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Kesehatan

**BADAI ISMOYO, SKM, MM**

NIP.19651222 198703 1 006

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pelayanan dan  
Sumber Daya Kesehatan

**dr. EDI KUSWORO**

NIP. 19760706 200604 1 006



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan P3K dan Pemeliharaan PSC 119	12 bulan
2	Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Puskesmas	5 Unit
3	Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Hibah Uang untuk Ambulan untuk RS Swasta	1 Paket
4	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit untuk pelayanan rujukan	7 Dokumen
5	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS, Klinik, dll) yang dilakukan pembinaan dan monitoring	75 Lokasi
6	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan antropometri kit untuk penguatan intervensi stunting	53 Paket
		Jumlah Ketersediaan Prasarana Mobil Promosi Kesehatan untuk Penguatan Intervensi Stunting	1 Unit
7	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian reakreditasi	19 Puskesmas
8	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan	850.000 orang
9	Kegiatan Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	20 Lokasi

	Sasaran : Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kabupaten Kudus		
		Jumlah Rumah Sakit tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	9 Lokasi
		Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	19 Puskesmas
		Jumlah Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan yang memnuhi syarat Perijinan	171 Lokasi
		Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan	9 Jenis
		Jumlah P-IRT yang memenuhi syarat perizinan	100 IRT
		Jumlah produksi dan produk makanan yang memenuhi syarat kesehatan	100 Lokasi
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	16 Orang
10	Tersedianya sarana, prasarana, obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pengadaan penunjang farmasi dan perbekes	3 jenis
		Jumlah pengadaan/ pemeliharaan alat penunjang farmasi obat instalasi farmasi	8 jenis

	<b>SUB KEGIATAN</b>		<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	583.735.000	DBHCHT
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.	7.568.977.800	Pajak Rokok DBHCHT
3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	600.000.000	PAD
4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp.	25.000.000	Pajak Rokok
5	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp.	350.000.000	DBHCHT
6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.139.985.000	DAK Fisik
7	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp.	216.453.000	DBHCHT
8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp.	973.720.000	DAK Non Fisik
9	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.	47.690.341.000	Pajak Rokok DBHCHT
10	Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	Rp.	891.334.907	Pajak Rokok
11	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp.	689.270.000	DBHCHT



12 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alkes/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rp.

204.998.728

Pajak Rokok

Kepala Dinas Kesehatan



**BADAI ISMOYO, SKM, MM**

NIP.19651222 198703 1 006

Kudus, 26 April 2021

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan



**dr. EDI KUSWORD**

NIP. 19760706 200604 1 006

### RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan P3K dan Pemeliharaan PSC 119	12 bulan
2	Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Puskesmas	5 Unit
3	Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Hibah Uang untuk Ambulan untuk RS Swasta	1 Paket
4	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit untuk pelayanan rujukan	7 Dokumen
5	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS, Klinik, dll) yang dilakukan pembinaan dan monitoring	75 Lokasi
6	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan antropometri kit untuk penguatan intervensi stunting	53 Paket
		Jumlah Ketersediaan Prasarana Mobil Promosi Kesehatan untuk Penguatan Intervensi Stunting	1 Unit
7	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian reakreditasi	19 Puskesmas
8	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan	850.000 orang
9	Kegiatan Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	20 Lokasi

	Sasaran : Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kabupaten Kudus		
		Jumlah Rumah Sakit tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	9 Lokasi
		Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	19 Puskesmas
		Jumlah Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan yang memnuhi syarat Perijinan	171 Lokasi
		Jenis tenaga kesehatan yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan	9 Jenis
		Jumlah P-IRT yang memenuhi syarat perizinan	100 IRT
		Jumlah produksi dan produk makanan yang memenuhi syarat kesehatan	100 Lokasi
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	16 Orang
10	Tersedianya sarana, prasarana, obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pengadaan penunjang farmasi dan perbekes	3 jenis
		Jumlah pengadaan/pemeliharaan alat penunjang farmasi obat instalasi farmasi	8 jenis

Kudus, 26 April 2021

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

  
**dr. EDI KUSWORDO**  
 NIP. 19760706 200604 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KESEHATAN

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311  
Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030  
Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id) Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BADAI ISMOYO, SKM, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS KESEHATAN

BADAI ISMOYO, SKM, MM  
Pembina Tk. I  
NIP.19651222 198703 1 006

Kudus, April 2021  
PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM  
Pembina  
NIP. 19700406 199003 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PERANGKAT DAERAH : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS**  
**KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 th	≥2%
		Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
		Cakupan calon jamaah haji yang terlayani	100%
		Cakupan masyarakat terkena wabah yang tertangani	100%
		Cakupan mingguann penyakit potensial KLB/ wabah dimasyarakat	100%
		Cakupan penanganan KIPI	100%
		Cakupan Imunisasi Anak Sekolah terlayani	100%
		Penderita DM yang ditangani sesuai standar	100%
		Penderita Hipertensi ditangani sesuai standar	100%
		Penderita Jiwa ditangani sesuai standar	100%
		Skrining FR PTM pada penduduk usia produktif (15 – 59 th)	100%
		Skrining FR PTM pada penduduk usia lansia (≥ 60 th)	100%



	Penemuan penderita dan penanganan penderita penyakit pneumonia balita	100%
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	100%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	>70%
	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
	Kesembuhan penderita TB BTA positif (cure rate)	>85%
	Insiden rate penyakit DBD per 100.000 jumlah penduduk	<20%
	Angka kematian (CFR) DBD	<1%
	Angka kematian (CFR) Diare per 10.000 penduduk	<1/100.000
	Penderita malaria yang diobati	100%
	Penderita kusta yang diselesaikan berobat (RFT Rate)	>90%
	Kasus filariasis yang ditangani	100%
	Pelayanan Skrening kasus HIV	100%
	Pelayanan Skrening Hepatitis Bumil	90%
	Angka kematian karena tuberkulosis	<1%
	Proporsi kasus tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (Succes Rate)	90%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis (02.11)	Rp. 245.279.000	Pajak Rokok
2.	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (02.12)	Rp. 477.769.000	Pajak Rokok
3.	Pelayanan kesehatan penyakit Menular dan tidak menular (02.25)	Rp. 300.933.000	DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
4.	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian obat masal (02.36)	Rp. 1.458.014.000	Pajak Rokok
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana (02.14)	Rp. 11.754.052.000	DID (Dana Insentif Daerah) DAU (Dana bagi Penduduk terdampak krisis Alokasi Umum)
6.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(02.20)	Rp. 209.375.000	DAU (Dana bagi Penduduk terdampak krisis Alokasi Umum)
7.	Operasional Pelayanan	Rp. 4.371.840.000	DAU (Dana bagi

	Rumah Sakit		Penduduk terdampak krisis Alokasi Umum)
8.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp. 6.708.391.000	DAU (Dana bagi Penduduk terdampak krisis Alokasi Umum)
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Rp. 14.793.000	Pajak Rokok
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Rp. 14.800.000	Pajak Rokok
11.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp. 5.988.779.000	DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)

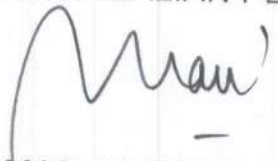
Kudus, April 2021

MENGETAHUI  
KEPALA DINAS KESEHATAN



BADAI ISMOYO, SKM, MM  
Pembina Tk. I  
NIP.19651222 198703 1 006

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM  
Pembina  
NIP. 19700406 199003 1 004



**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Tahun : 2021

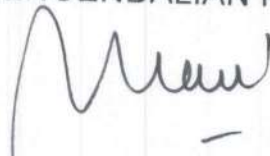
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 th	≥2%
		Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
		Cakupan calon jamaah haji yang terlayani	100%
		Cakupan masyarakat terkena wabah yang tertangani	100%
		Cakupan mingguann penyakit potensial KLB/ wabah dimasyarakat	100%
		Cakupan penanganan KIPI	100%
		Cakupan Imunisasi Anak Sekolah terlayani	100%
		Penderita DM yang ditangani sesuai standar	100%
		Penderita Hipertensi ditangani sesuai standar	100%
		Penderita Jiwa ditangani sesuai standar	100%
		Skrining FR PTM pada penduduk usia produktif (15 – 59 th)	100%

		Skrining FR PTM pada penduduk usia lansia ( $\geq 60$ th)	100%
		Penemuan penderita dan penanganan penderita penyakit pneumonia balita	100%
		Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	100%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	>70%
		Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
		Kesembuhan penderita TB BTA positif (cure rate)	>85%
		Insiden rate penyakit DBD per 100.000 jumlah penduduk	<20%
		Angka kematian (CFR) DBD	<1%
		Angka kematian (CFR) Diare per 10.000 penduduk	<1/100.000
		Penderita malaria yang diobati	100%
		Penderita kusta yang diselesaikan berobat (RFT Rate)	>90%
		Kasus filariasis yang ditangani	100%
		Pelayanan Skrening kasus HIV	100%
		Pelayanan Skrening Hepatitis Bumil	90%

		Angka kematian karena tuberkulosis	<1%
		Proporsi kasus tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (Succes Rate)	90%

Kudus, April 2021

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM

Pembina

NIP. 19700406 199003 1 004





## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311

Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030

Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id) Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)**RENCANA KERJA TAHUNAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (DKK)</b>	<b>83,00 Indeks</b>	<b>19.388.967.668</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja</b>	<b>18,00 dokumen</b>	<b>231.500.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Renja, RKPD, KUA PPAS, RKA, PTP, Rencana Aksi, PK, RTP)	11,00 dokumen	137.500.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja yang tersusun (bahan evaluasi RPJMD, evaluasi renstra, evaluasi renja, LKjIP, LKPJ, LPPD, SAKIP)	7,00 dokumen	94.000.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>	<b>7,00 dokumen</b>	<b>13.518.741.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN	12,00 bulan	13.267.241.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
		Jumlah Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 ASN yang mendapatkan insentif	1.304,00 OB		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honor bagi pengelola dan pelaksana kegiatan/ keuangan	12,00 bulan	178.500.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang tersusun	7,00 dokumen	73.000.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya</b>	<b>150,00 orang</b>	<b>1.335.000.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/ diklat teknis/ fungsional	226,00 orang	1.335.000.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum</b>	<b>7,00 laporan</b>	<b>491.958.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	14,00 jenis	11.001.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	53,00 jenis	138.783.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK

X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah belanja peralatan rumah tangga	19,00 jenis	19.751.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan minuman rapat/ pegawai/ tamu yang tersedia	2.900,00 orang	168.970.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang tersedia	47,00 jenis		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	6,00 jenis	31.268.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (koran/ majalah) dan perundang-undangan yang tersedia	12,00 bulan	9.999.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	254,00 OH	112.186.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan pengadaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan</b>	<b>1,00 laporan</b>	<b>141.839.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	6,00 jenis	141.839.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan penyediaan jasa penunjang pada Dinas Kesehatan</b>	<b>4,00 laporan</b>	<b>2.628.234.668</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, jasa paket/ pengiriman	12,00 kali	1.200.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Tersedianya materai	200,00 lembar		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, internet, air dan listrik	12,00 bulan	619.168.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	41,00 unit	34.712.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor tenaga pelaksana kegiatan. PHD dan tenaga kebersihan	57,00 orang	1.973.154.668	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan</b>	<b>4,00 laporan</b>	<b>1.041.695.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	33,00 unit	247.690.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Jumlah pembelian BBM/ minyak pelumas	12.700,00 liter		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor (pemeliharaan gedung DKK dan sewa tanah Pusk/ Pustu)	51,00 lokasi	561.547.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan	1,00 paket		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	35,00 unit	232.458.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Terlaksananya pemeliharaan gedung IFK	1,00 paket		

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Terlaksananya tambah Daya dan Pemasangan Instalasi Listrik Gedung PSC 119 DKK	1,00 paket		
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>100,00 %</b>	<b>172.455.724.061</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
		<b>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>100,00 %</b>		<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
		<b>Cakupan pelayanan pengendalian penyakit</b>	<b>100,00 %</b>		<b>KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP</b>	<b>19,00 Puskesmas</b>	<b>9.646.981.528</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Puskesmas	5,00 unit	7.568.977.800	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah hibah uang untuk ambulan untuk RS swasta	1,00 paket	600.000.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan penunjang farmasi dan perbekes	3,00 jenis	689.270.000	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, PERBEKALAN, DAN ALAT KESEHATAN
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan P3K dan pemeliharaan PSC 119	12,00 bulan	583.735.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan/ pembelian alat penunjang farmasi asi obat instalasi farmasi)	8,00 jenis	204.998.728	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, PERBEKALAN, DAN ALAT KESEHATAN
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</b>	<b>12,00 item</b>	<b>162.239.397.533</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
		<b>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</b>	<b>12,00 item</b>		<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
		<b>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</b>	<b>12,00 item</b>		<b>KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.050,00 bumil	300.200.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	15.200,00 ibu bersalin	683.750.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.100,00 bayi	432.200.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55.500,00 balita	207.000.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI



No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjangkaran kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan UKS	37.459,00 siswa	151.810.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	577.866,00 orang	531.203.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.919,00 orang	1.266.244.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	231.693,00 orang	57.438.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.976,00 orang	57.387.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.430,00 kasus	245.279.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19.082,00 kasus	477.769.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2,00 kejadian	110.000.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	231.693,00 orang		
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.919,00 orang		
		Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	577.866,00 orang		
		Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	55,00 lokasi		
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	132,00 lokasi		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	19,00 puskesmas		

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	690,00 paket	680.150.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah calon jamaah haji dan anak sekolah yang dilakukan pengukuran/ tes kebugaran anak sekolah dan calon jamaah haji	5.150,00 orang	146.800.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	710,00 lokasi	95.000.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
		Jumlah pengelolaan limbah di Fasyankes	27,00 lokasi		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kader kesehatan remaja yang mengikuti Saka Bhakti Husada (SBH), poskestren, orientasi SBH	250,00 orang	422.725.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN
		Terlaksananya publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9,00 kali		
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Akupuntur	19,00 Puskesmas	22.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	9,00 kec	182.450.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
		Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	9,00 kecamatan		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2.225,00 orang	14.793.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	19,00 Puskesmas	14.800.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	19,00 Puskesmas	740.619.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	850.000,00 orang	47.796.850.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	12,00 kali	10.000.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah desa/ kel yang melaksanakan STBM	132,00 desa/ kelurahan	100.000.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas	778.298,00 orang	102.207.303.533	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
		Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas yang mendapatkan insentif vaksinator (DKK)	146.832,00 OH		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan ke Labkesda	6.190,00 orang	2.385.780.000	
		Jumlah tenaga kesehatan fasilitas kesehatan lainnya/ klinik yang mendapatkan insentif penanganan Covid-19	162.288,00 OH		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian reakreditasi	19,00 Puskesmas	216.453.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya vaksinasi Covid-19 dan supervisi/ monitoring pelaksanaan imunisasi	19,00 Puskesmas	2.603.394.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Bintek dan validasi data SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) penyakit berpotensi KLB/ wabah	2,00 kegiatan	80.000.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi</b>	<b>2,00 dokumen</b>	<b>171.897.000</b>	<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
		<b>Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi</b>	<b>2,00 dokumen</b>		<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi kesehatan	4,00 dokumen	43.999.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pembayaran jasa jaringan internet Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	12,00 bulan	127.898.000	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan</b>	<b>9,00 lokasi</b>	<b>397.448.000</b>	<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
		<b>Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan</b>	<b>9,00 lokasi</b>		<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C dan D yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perizinan	75,00 lokasi	22.448.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan (puskesmas, RS, klinik, dll) yang dilakukan pembinaan dan monitoring	75,00 lokasi	350.000.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

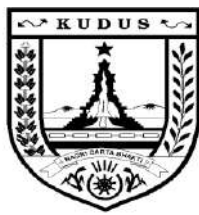
No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit untuk pelayanan rujukan	7,00 dokumen	25.000.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan</b>	<b>91,30 %</b>	<b>508.676.907</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
<b>1.02.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sertifikat perizinan</b>	<b>1.200,00 lembar</b>	<b>42.179.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah praktik mandiri dokter, perawat, bidan, terapis yang memenuhi izin seseuai standar	171,00 lokasi	42.179.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM</b>	<b>2,00 laporan</b>	<b>381.697.907</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	16,00 orang	367.647.907	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
		Jumlah Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Non ASN yang mendapatkan insentif	436,00 OB		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya koordinasi dan monitoring tenaga kesehatan non PNS	9,00 kecamatan	14.050.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM</b>	<b>1,00 laporan</b>	<b>84.800.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan rencana kebutuhan tenaga kesehatan	1,00 dokumen	84.800.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
		Jumlah pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan ASN di lingkup dinas kesehatan, UPT/ UPTD dan RSUD	2,00 kali		
		Jumlah petugas pengawas yang mengikuti peningkatan kompetensi	30,00 orang		
		Jumlah petugas pengelola fasilitas kefarmasian yang mengikuti bimbingan teknis	80,00 orang		
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan</b>	<b>91,30 %</b>	<b>260.063.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan</b>	<b>120,00 IRT</b>	<b>117.374.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri rumah tangga yang dilakukan pembinaan dan sertifikasi	100,00 IRT	117.374.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
		Jumlah IRT yang dilakukan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT	30,00 lokasi		
		Jumlah pelaku usaha IRTP yang mengikuti Bimtek keamanan pangan	80,00 orang		
		Jumlah pengkajian ulang Sertifikasi Produksi	1,00 kali		
1.02.04.2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan</b>	<b>790,00 lokasi</b>	<b>51.750.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya kegiatan pengawasan/pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	790,00 lokasi	51.750.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.04.2.05	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan</b>	<b>9,00 lokasi</b>	<b>20.000.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengawasan/pemeriksaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	9,00 lokasi	20.000.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.04.2.06	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah produksi dan produk makanan yang memenuhi syarat kesehatan</b>	<b>120,00 lokasi</b>	<b>70.939.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan produk makanan minuman yang beredar	100,00 lokasi	36.399.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikasi perizinan Industri Rumah Tangga	100,00 lokasi	34.540.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.968.465.000</b>	<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132,00 desa/kel	776.475.000	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132,00 desa/ kelurahan	776.475.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN
		Jumlah peserta yang mengikuti KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan	300,00 orang		
		Jumlah cetak media promosi penanganan Covid-19	2,00 jenis		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3,00 kali	450.000.000	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah sosialisasi publikasi dalam rangka promosi kesehatan	3,00 jenis	450.000.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa siaga aktif mandiri	20,00 desa/kel	741.990.000	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya bintek dan monev UKBM untuk kader di masing- masing kecamatan	9,00 kecamatan	741.990.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN

Kudus, januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
  
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
 DINAS KESEHATAN  
 BADAI ISMOYO, SKM, MM  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196512221987031006



## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311

Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030

Email : [dinkes@kuduskab.go.id](mailto:dinkes@kuduskab.go.id) Website : [dinkes.kuduskab.go.id](http://dinkes.kuduskab.go.id)**RENCANA KERJA TAHUNAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (DKK)</b>	<b>83,00 Indeks</b>	<b>23.753.476.032</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja</b>	<b>18,00 dokumen</b>	<b>144.652.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Renja, RKPD, KUA PPAS, RKA, PTP, Rencana Aksi, PK, RTP)	11,00 dokumen	84.854.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja yang tersusun (bahan evaluasi RPJMD, evaluasi renstra, evaluasi renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, SAKIP)	7,00 dokumen	59.798.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>	<b>7,00 dokumen</b>	<b>19.243.006.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN	12,00 bulan	18.997.620.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
		Jumlah Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 ASN yang mendapatkan insentif	1.304,00 OB		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honor bagi pengelola dan pelaksana kegiatan/ keuangan	12,00 bulan	178.500.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang tersusun	7,00 dokumen	66.886.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya</b>	<b>150,00 orang</b>	<b>15.000.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/ diklat teknis/ fungsional	226,00 orang	15.000.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum</b>	<b>7,00 laporan</b>	<b>491.958.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	14,00 jenis	11.001.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	53,00 jenis	138.783.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah belanja peralatan rumah tangga	19,00 jenis	19.751.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan minuman rapat/ pegawai/ tamu yang tersedia	2.900,00 orang	168.970.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang tersedia	47,00 jenis		



X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	6,00 jenis	31.268.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (koran/ majalah) dan perundang-undangan yang tersedia	12,00 bulan	9.999.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	254,00 OH	112.186.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan pengadaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan</b>	<b>1,00 laporan</b>	<b>141.839.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	6,00 jenis	141.839.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan penyediaan jasa penunjang pada Dinas Kesehatan</b>	<b>4,00 laporan</b>	<b>2.699.626.032</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, jasa paket/ pengiriman	12,00 kali	1.200.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Tersedianya materai	200,00 lembar		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, internet, air dan listrik	12,00 bulan	619.168.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	41,00 unit	34.712.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor tenaga pelaksana kegiatan. PHD dan tenaga kebersihan	57,00 orang	2.044.546.032	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan</b>	<b>4,00 laporan</b>	<b>1.017.395.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	33,00 unit	223.390.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Jumlah pembelian BBM/ minyak pelumas	12.700,00 liter		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor (pemeliharaan gedung DKK daan sewa tanah Pusk/ Pustu)	51,00 lokasi	561.547.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan	1,00 paket		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	35,00 unit	232.458.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DKK
		Terlaksananya pemeliharaan gedung IFK	1,00 paket		
		Terlaksananya tambah Daya dan Pemasangan Instalasi Listrik Gedung PSC 119 DKK	1,00 paket		
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>100,00 %</b>	<b>261.544.251.818</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
		<b>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>100,00 %</b>		<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
		<b>Cakupan pelayanan pengendalian penyakit</b>	<b>100,00 %</b>		<b>KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP</b>	<b>19,00 Puskesmas</b>	<b>36.277.992.118</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Puskesmas	5,00 unit	5.205.197.540	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah hibah uang untuk ambulans untuk RS swasta	1,00 paket	4.150.849.900	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan prasarana mobil promosi kesehatan untuk penguatan intervensi stunting	1,00 Unit	1.139.985.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
		Jumlah ketersediaan antropometri kit untuk penguatan intervensi stunting	53,00 paket		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan alat kesehatan/laboratorium untuk pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin	4,00 set	19.068.090.000	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, PERBEKALAN, DAN ALAT KESEHATAN
		Jumlah ketersediaan alat kesehatan untuk pelayanan vaksin	10,00 unit		
		Jumlah ketersediaan alat laboratorium biological safety	1,00 unit		
		Jumlah ketersediaan peralatan gawat darurat obsetri neonatal	9,00 set		
		Jumlah ketersediaan peralatan pelayanan KIA dan KB	9,00 set		
		Jumlah ketersediaan UKS kit	10,00 set		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat	3,00 jenis	2.037.463.000	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, PERBEKALAN, DAN ALAT KESEHATAN
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan penunjang farmasi dan perbekes	3,00 jenis	2.930.698.950	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, PERBEKALAN, DAN ALAT KESEHATAN
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan P3K dan pemeliharaan PSC 119	12,00 bulan	1.383.735.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan/ pembelian alat penunjang farmasi (obat instalasi farmasi)	8,00 jenis	361.972.728	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, PERBEKALAN, DAN ALAT KESEHATAN
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</b>	<b>12,00 item</b>	<b>224.874.854.700</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
		<b>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</b>	<b>12,00 item</b>		<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
		<b>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</b>	<b>12,00 item</b>		<b>KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.050,00 bumil	1.073.925.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	15.200,00 ibu bersalin	272.410.750	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.100,00 bayi	130.187.570	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55.500,00 balita	371.750.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjangkaran kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan UKS	37.459,00 siswa	151.810.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	577.866,00 orang	360.858.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.919,00 orang	37.009.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.976,00 orang	57.387.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.430,00 kasus	245.279.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19.082,00 kasus	477.769.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2,00 kejadian	25.829.605.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	231.693,00 orang		
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.919,00 orang		
		Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	577.866,00 orang		
		Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	55,00 lokasi		
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	132,00 lokasi		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatanolahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	19,00 puskesmas		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya penanganan pandemi covid-19	9,00 kecamatan	18.062.052.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	690,00 paket	2.092.081.680	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah calon jamaah haji dan anak sekolah yang dilakukan pengukuran/ tes kebugaran anak sekolah dan calon jamaah haji	5.150,00 orang	142.668.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	710,00 lokasi	382.353.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
		Jumlah pengelolaan limbah di Fasyankes	27,00 lokasi		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kader kesehatan remaja yang mengikuti Saka Bhakti Husada (SBH), poskestren, orientasi SBH	250,00 orang	605.212.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Terlaksananya publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9,00 kali		
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Akupuntur	19,00 Puskesmas	22.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	9,00 kec	209.375.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
		Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	9,00 kecamatan		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2.225,00 orang	14.793.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	19,00 Puskesmas	14.800.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	19,00 Puskesmas	319.893.000	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	850.000,00 orang	47.796.850.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	12,00 kali	10.000.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah desa/ kel yang melaksanakan STBM	132,00 desa/ kelurahan	83.355.000	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan Rumah Sakit Swasta yang mendapatkan insentif vaksinator	139.104,00 OH	4.371.840.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas	778.298,00 orang	112.956.352.200	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
		Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas yang mendapatkan insentif vaksinator (DKK)	146.832,00 OH		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan ke Labkesda	6.190,00 orang	6.393.014.500	
		Jumlah tenaga kesehatan fasilitas kesehatan lainnya/ klinik yang mendapatkan insentif penanganan Covid-19	162.288,00 OH		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian reakreditasi	19,00 Puskesmas	973.720.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya vaksinasi Covid-19 dan supervisi/ monitoring pelaksanaan imunisasi	19,00 Puskesmas	808.014.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Bintek dan validasi data SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) penyakit berpotensi KLB/ wabah	2,00 kegiatan	608.491.000	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	2,00 dokumen	171.897.000	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		<b>Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi</b>	<b>2,00 dokumen</b>		<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi kesehatan	4,00 dokumen	43.999.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pembayaran jasa jaringan internet Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	12,00 bulan	127.898.000	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan</b>	<b>9,00 lokasi</b>	<b>219.508.000</b>	<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
		<b>Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan</b>	<b>9,00 lokasi</b>		<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C dan D yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perizinan	75,00 lokasi	22.448.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan (puskesmas, RS, klinik, dll) yang dilakukan pembinaan dan monitoring	75,00 lokasi	172.060.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit untuk pelayanan rujukan	7,00 dokumen	25.000.000	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan</b>	<b>91,30 %</b>	<b>2.885.314.907</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
<b>1.02.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sertifikat perizinan</b>	<b>1.200,00 lembar</b>	<b>42.179.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah praktik mandiri dokter, perawat, bidan, terapis yang memenuhi izin sesuai standar	171,00 lokasi	42.179.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM</b>	<b>2,00 laporan</b>	<b>2.561.697.907</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	16,00 orang	2.547.647.907	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
		Jumlah Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Non ASN yang mendapatkan insentif	436,00 OB		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya koordinasi dan monitoring tenaga kesehatan non PNS	9,00 kecamatan	14.050.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM</b>	<b>1,00 laporan</b>	<b>281.438.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan rencana kebutuhan tenaga kesehatan	1,00 dokumen	281.438.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Jumlah pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan ASN di lingkup dinas kesehatan, UPT/ UPTD dan RSUD	2,00 kali		
		Jumlah petugas pengawas yang mengikuti peningkatan kompetensi	30,00 orang		
		Jumlah petugas pengelola fasilitas kefarmasian yang mengikuti bimbingan teknis	80,00 orang		
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan</b>	<b>91,30 %</b>	<b>428.750.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Terlaksananya pengawasan apotek, toko obat dan UMOT</b>	<b>100,00 lokasi</b>	<b>20.449.000</b>	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	100,00 lokasi	20.449.000	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan</b>	<b>120,00 IRT</b>	<b>213.540.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri rumah tangga yang dilakukan pembinaan dan sertifikasi	100,00 IRT	213.540.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
		Jumlah IRT yang dilakukan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT	30,00 lokasi		
		Jumlah pelaku usaha IRTP yang mengikuti Bimtek keamanan pangan	80,00 orang		
		Jumlah pengkajian ulang Sertifikasi Produksi	1,00 kali		
<b>1.02.04.2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan</b>	<b>790,00 lokasi</b>	<b>28.866.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya kegiatan pengawasan/pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	790,00 lokasi	28.866.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
<b>1.02.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan</b>	<b>9,00 lokasi</b>	<b>13.958.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>



No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengawasan/ pemeriksaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	9,00 lokasi	13.958.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
<b>1.02.04.2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah produksi dan produk makanan yang memenuhi syarat kesehatan</b>	<b>120,00 lokasi</b>	<b>151.937.000</b>	<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan produk makanan minuman yang beredar	100,00 lokasi	117.397.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah penertbitan sertifikasi perizinan Industri Rumah Tangga	100,00 lokasi	34.540.000	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN, PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>100,00 %</b>	<b>997.026.000</b>	<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader</b>	<b>132,00 desa/kel</b>	<b>188.267.000</b>	<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132,00 desa/ kelurahan	188.267.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN
		Jumlah peserta yang mengikuti KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan	300,00 orang		
		Jumlah cetak media promosi penanganan Covid-19	2,00 jenis		
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</b>	<b>3,00 kali</b>	<b>66.769.000</b>	<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah sosialisasi publikasi dalam rangka promosi kesehatan	3,00 jenis	66.769.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah desa siaga aktif mandiri</b>	<b>20,00 desa/kel</b>	<b>741.990.000</b>	<b>KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya bintek dan money UKBM untuk kader di masing-masing kecamatan	9,00 kecamatan	741.990.000	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN

Kudus, nopember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 DINAS KESEHATAN  
**BADAI ISMOYO, SKM, MM**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196512221987031006



**BUPATI KUDUS**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

NOMOR : 002.6 / 492 /2021

**BUPATI KUDUS**

Memberikan Penghargaan kepada :

**DINAS KESEHATAN**

atas prestasinya sebagai

**Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik Urutan KETIGA Tahun 2020**

dengan Nilai 77,28



Kudus, 16 November 2021

BUPATI KUDUS,



Dr. H. HARTOPO, ST. MM. MH.



**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

menganugerahkan

**TANDA PENGHARGAAN**

kepada :

**Puskesmas Ngemplak**  
**Kudus**  
**Provinsi Jawa Tengah**

**Puskesmas dengan peningkatan Indeks Keluarga Sehat tertinggi  
tingkat provinsi**

**(Kep.Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/6565/2021)**

**Jakarta, 3 November 2021**

**MENTERI KESEHATAN,**



**Budi G. Sadikin**